



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



ADAPTASI & TRANSFORMASI KOPERASI DAN UMKM



Keynote Speech
Menteri Koperasi dan UKM

Jakarta, 29 Desember 2020





DAMPAK PANDEMI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Sebagaimana kita ketahui bersama pada tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa karena kita menghadapi situasi pandemi Covid-19. Kondisi ini juga dialami oleh 220 negara lainnya. *(worldofmeters,2020)*



COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

Last updated: December 28, 2020, 09:13 GMT

[Graphs](#) - [Countries](#) - [Death Rate](#) - [Symptoms](#) - [Incubation](#) - [Transmission](#) - [News](#)

Coronavirus Cases:

81,194,166

[view by country](#)

Dampak Covid-19 bagi Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada *Quarter I* hanya 2,97%.
(Berita Resmi BPS,2020)

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada *Quarter II* minus 5,32%.
(Berita Resmi BPS,2020)

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada *Quarter III* minus 3,49%.
(Berita Resmi BPS,2020)

Tantangan di depan yang akan di hadapi

1

Bertambahnya angka kemiskinan, diprediksi dalam skenario sangat berat, kemiskinan akan bertambah 4,86 juta orang. (Kemenkeu,2020)

2

Bertambahnya angka pengangguran, yakni 9,77 juta pengangguran, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07%. (BPS,2020)

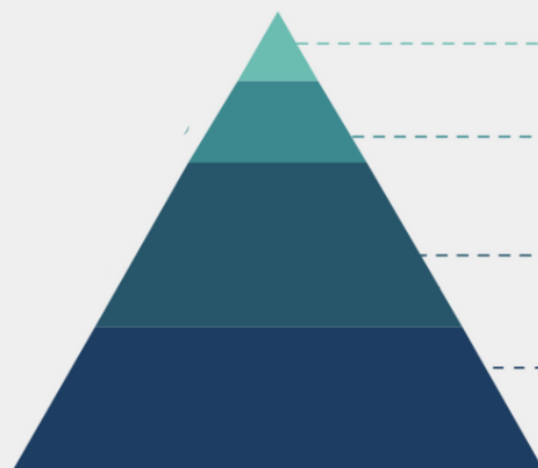
3

Masalah Kesehatan, dimana penyebaran Covid-19 di Indonesia masih tinggi dengan rata-rata 6.984 kasus baru setiap harinya. (covid19.go.id)



PROFIL UMKM INDONESIA

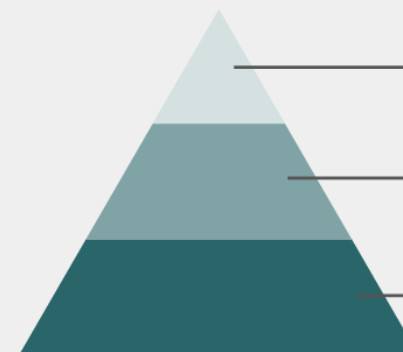
POPULASI USAHA



SKALA	QTY	PDB	EKSPOR
BESAR	5.550 (0,01%)	38,93%	85,63%
MENENGAH	60.702 (0,09%)	13,70%	10,85%
SMALL	783.132 (1,22%)	9,60%	2,3%
MIKRO	63.350.222 (98,68%)	37,77%	1,22%

Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, 2018

KOPERASI DI INDONESIA

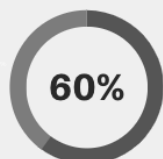


NASIONAL	3.187 unit [2,59%]
PROVINSI	6.389 unit [5,19%]
KABUPATEN/KOTA	113.472 unit [92,22%]

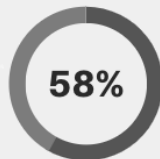
POPULASI KOPERASI

TOTAL KOPERASI : 123.048 UNIT

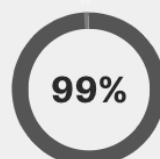
Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, Desember 2019



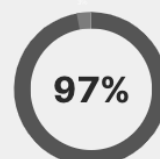
PDB NASIONAL



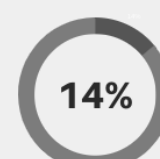
INVESTASI NASIONAL



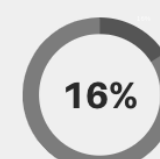
POPULASI USAHA



TENAGA KERJA



EKSPOR



DIGITALISASI UMKM

*



DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI KUMKM

“Berbeda dengan krisis tahun 1998 dan 2008, UMKM sangat terdampak baik dari sisi *supply* maupun *demand*, hal ini disebabkan oleh pembatasan interaksi fisik yang menyebabkan perubahan **perilaku dan pola konsumsi konsumen**: daya beli menurun, bergeser ke bahan pokok, dan belanja *online*”

Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat:

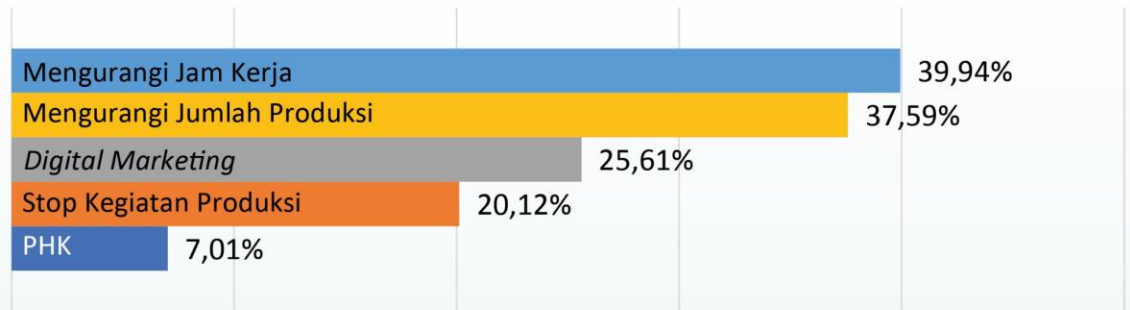
Prioritas Pengeluaran Konsumen (%)



Barang yang konsumsinya berkurang (%)



Yang telah dilakukan UMKM untuk bertahan ditengah pandemi:



Perubahan Perilaku Konsumen:

PERUBAHAN PERILAKU

AKTIVITAS DI RUMAH

BELANJA ONLINE



KONSUMSI PRODUK KESEHATAN/DAYA TAHAN TUBUH

DAMPAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE



3 Sektor Paling Terdampak



Sumber: BPS, Agustus 2020





PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI & UKM TA. 2021



Intervensi Kebijakan

- PermenKopUKM No. 6 Th. 2020 Tentang BPUM
- PermenKopUKM No. 9 Th. 2020 Tentang Pengawasan Koperasi



Intervensi Permodalan & Pembiayaan Alternatif



Intervensi Supply (Hulu) & Demand (Hilir)



Intervensi Model Bisnis



Intervensi Transformasi Digital KUMKM



Intervensi Rantai Pasok (Sampai Global Value Chain)



UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK PANDEMI BAGI KOPERASI DAN UKM

HULU

HILIR

Supply Side

Salah satunya melalui sisi pembiayaan

PEN untuk UMKM Rp123,46 Triliun

- Insentif pajak (PPH Final UMKM DTP) (Rp. 2,4 T).
- Relaksasi dan restrukturisasi kredit (Rp. 114,06 T).
- Perluasan pembiayaan modal kerja (Rp. 7 T).
- Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM (Rp1T)

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan modal kerja Rp 2,4 Juta per Pelaku Usaha Mikro kepada 12 juta pelaku usaha mikro

Peningkatan Kapasitas SDM

Meningkatkan kualitas SDM dan produk UMKM untuk mempersiapkan UMKM onboarding/masuk ke ekosistem digital

- EDUKUKM.ID yaitu pelatihan daring/e-learning gratis (diakses di www.edukukm.id).
- Seri Podcast 60 detik untuk memandu UMKM ke model bisnis digital (diakses di kanal media sosial @kemenkopukm).
- Seri Webinar SPARC Campus (diakses di SMESCO).
- Kakak Asuh UMKM. Pelatihan untuk umum agar dapat membantu penjualan UMKM khususnya di e-commerce (diakses di SMESCO).
- Pelatihan Luring dilaksanakan di 88 kabupaten/kota, 301 angkatan dan 13.868 peserta.

Perbaiki Proses Bisnis

Perbaiki dan inovasi proses bisnis agar dapat terhubung ke rantai pasok serta bertransformasi ke formal

- Pusat bantuan konsultasi hukum gratis untuk KUMKM terdampak pandemi di www.kemenkopukm.go.id.
- Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Menyerap *supply* produk pangan Koperasi dan UMKM dan menyalurkan ke warung-warung tradisional.
- Korporatisasi usaha mikro, nelayan, petambak dll sebagai usaha transformasi ke sektor formal
- Factory sharing atau rumah produksi bersama
- Transformasi digital UMKM

Demand Side

Membuka akses pasar produk UMKM baik pasar lokal maupun global.

1. Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah dan BUMN:

- Laman UKM dan BeLa Pengadaan LKPP. Potensi senilai Rp321 triliun belanja pengadaan barang & jasa pemerintah untuk produk UMKM.
- Pasar Digital (PaDi). Kerjasama dengan KemenBUMN untuk belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp14 miliar UMKM dapat ikut serta. Potensi Rp35 triliun dan 27 kategori produk dan 9
- Fasilitasi produksi dan sertifikasi izin edar 27 juta masker terstandarisasi WHO buatan UMKM

2. Local Heroes UMKM

- UKM Award 2020
- Pahlawan Digital
- Ekshibisi UMKM Bangkit Merdeka

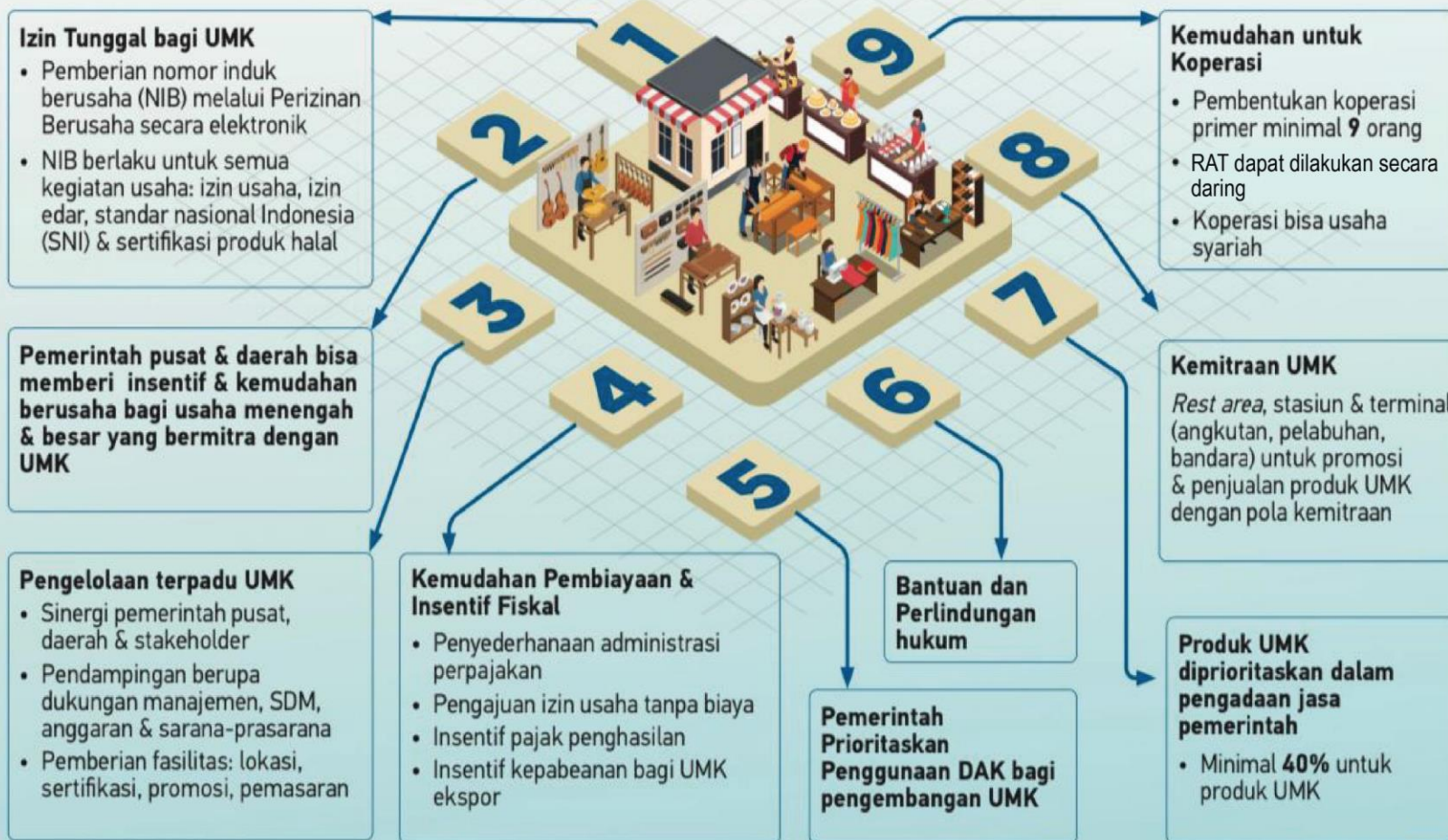


PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DAN KOPERASI PADA UU CIPTA KERJA



9 KEMUDAHAN BAGI UMK

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)





OUTLOOK 2021 : INDIKATOR-INDIKATOR STRATEGIS KUMKM

1 Kontribusi Terhadap PDB

	2021	2024
UMKM	62,36%	65%
KOPERASI	5,2%	5,5%

2 Kontribusi Ekspor UMKM



Indonesia

2021	15,12%
2024	21,60%

3 Start-up Berbasis Koperasi

#4 Indonesia berada di posisi ke-4 negara dengan jumlah *start-up* terbanyak.

54,44% *Start-up* didominasi oleh badan usaha PT

900 unit	2021
3500 unit	2024

4 Koperasi Modern Berbasis Digital

0,73% Dari jumlah koperasi aktif 123.048 unit, hanya 0,73% yang memiliki alamat *website*.

100 unit	2021
400 unit	2024

5 UMKM Naik Kelas

0,55%	2021
4%	2024



- Pengembangan kawasan dan Integrasi UKM masuk ke rantai pasok
- Digitalisasi Koperasi dan UMKM
- Inkubasi bisnis KUMKM
- Skema Pembiayaan sesuai model bisnis dan komoditi

6 Rasio Kewirausahaan



8.76%



4.74%



4.26%



3.47%



**Target 2024
4%**

*2021: Transformasi Kelembagaan dengan perubahan SOTK sesuai Perpres 96 Tahun 2020

Sumber: 1. Kementerian Koperasi dan UKM dan berbagai data yang di olah. (2019)
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Badan Pusat Statistik
4. Kementerian Perdagangan





PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI & UKM TA. 2021

KOPERASI MODERN

Memperbanyak Koperasi yang hadir dalam ekosistem digital dan memanfaatkan solusi teknologi digital dalam proses bisnisnya.

1

2

INFORMAL KE FORMAL

Korporatisasi pelaku usaha mikro baik seperti nelayan, petambak, produsen dll dalam kelembagaan koperasi

RANTAI PASOK

Meningkatkan rasio partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai pasok

3

4

WIRUSAHA PRODUKTIF

Meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia melalui intervensi startup dan wirausaha baru



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH

#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas
#SiapBersamaKUMKM



KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



Koperasi Bertahan Pada Saat Pandemi

Webinar Outlook 2021 Adaptasi dan Transformasi
Koperasi dan UMKM

*“Menuju Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas dan
Wirausaha Produktif”*

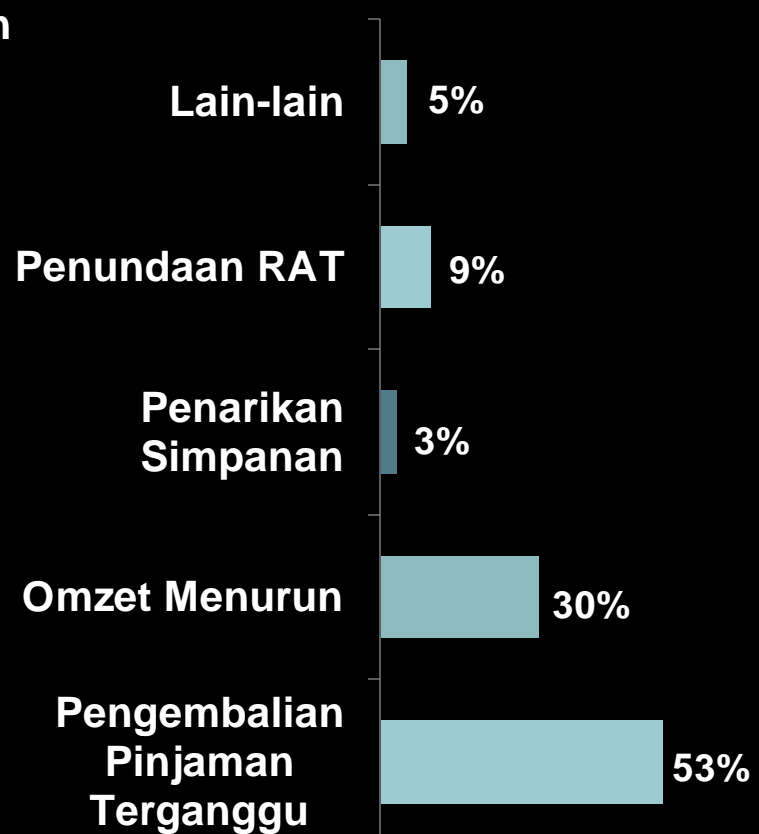
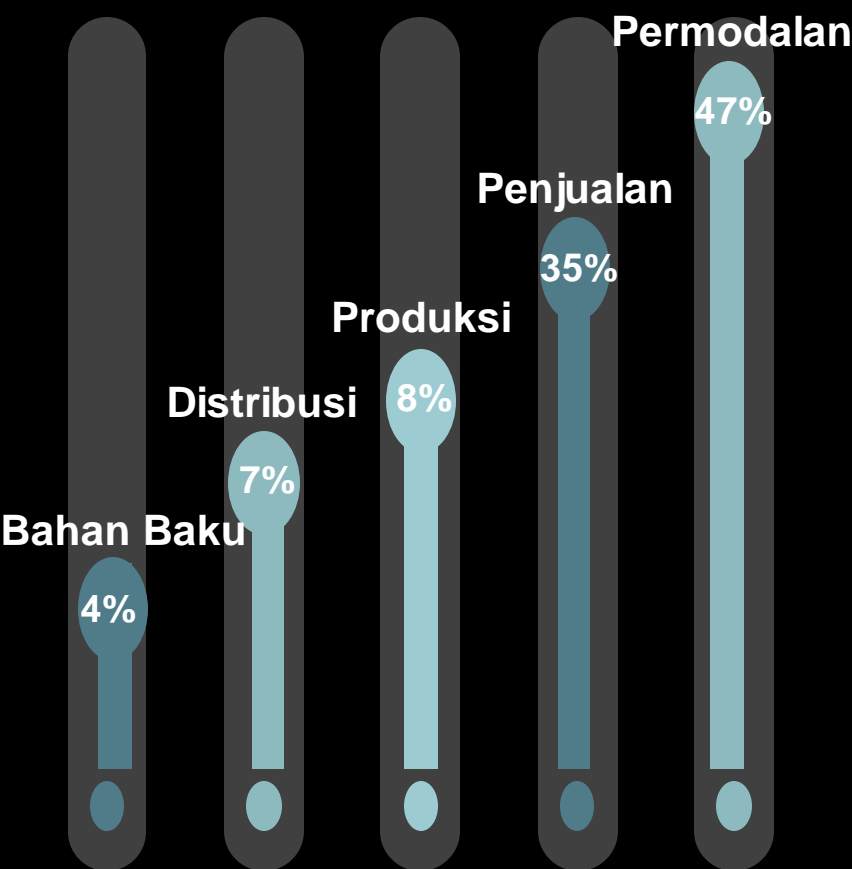
Rulli Nuryanto, SE, M.Si
Deputi Bidang Kelembagaan



BANGGA BUATAN
INDONESIA

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KOPERASI

PELUANG BISNIS DI MASA PANDEMI COVID-19



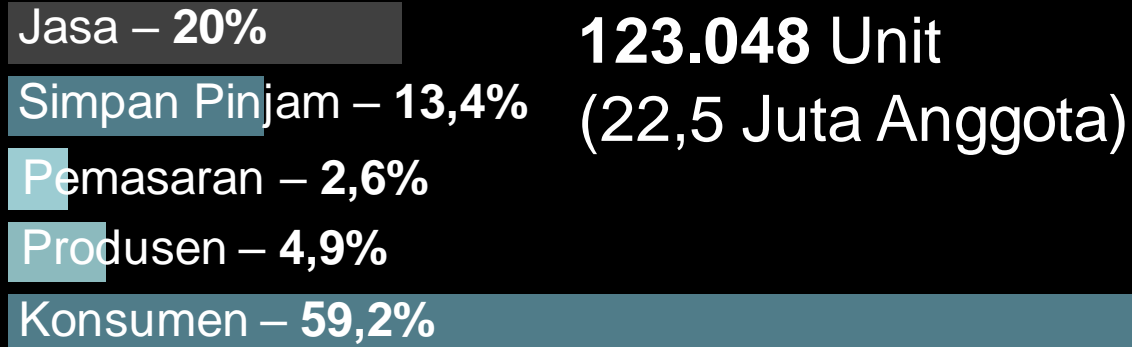
-  Grosir/E-commerce
-  Jasa Logistik
-  Jasa Antar Makanan
-  Rapat Online
-  Jasa Layanan Streaming
-  Telekomunikasi & Media
-  Pendidikan Online
-  Penyimpanan Data Base
-  Obat-Obatan
-  Jasa Kebersihan
-  Aktifitas Kebugaran di Rumah

Sumber: Pengaduan e-form Siap Bersama UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM, 2020 (data diolah)

Data PPKL : 27 Provinsi; 2.416 Koperasi 2020

POTENSI KOPERASI

KOPERASI INDONESIA



Data ODS akhir tahun 2019

DUKUNGAN LPDB – DANA PEN

Rp.1 Trilyun kepada 63 Koperasi (101.011 UMKM) **100%**

Rp.292 Milyar kepada 37 Koperasi (18.218 UMKM) **69%**

Data : Realisasi 01 Oktober - 21 Desember 2020

STRATEGI KOPERASI DI MASA PANDEMI C-19



Komitmen Anggota

Komunikasi Anggota

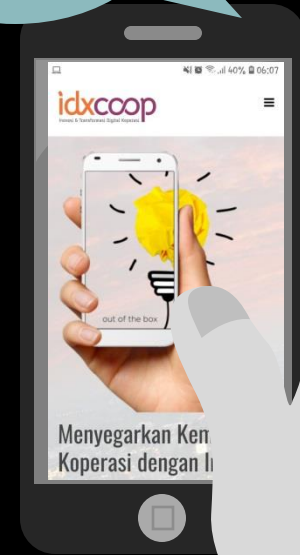
Usaha Online

Pelatihan Pendampingan

Kerjasama Koperasi

Pengelolaan Keuangan

KOPERASI DIGITAL



Data Base Anggota

Membangun Aplikasi

Sistem Trading Board

Sistem Pembayaran Online

STRATEGI POSITIONING KOPERASI TAHUN 2021

Digitalisasi Perkoperasian & UMKM



Pengembangan & Pembaruan Perkoperasian



- Pengembangan Teknologi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- Pengembangan *Database* Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- Penguatan Sistem Pengawasan Koperasi.

**Program
Deputi
Perkoperasian**

idxcoop
Inovasi & Transformasi Digital Koperasi
**Portal
Inovasi**



Tersebar di **33 Provinsi**
dengan Wilayah Kerja di
18 Provinsi dan 341 Kab./ Kota

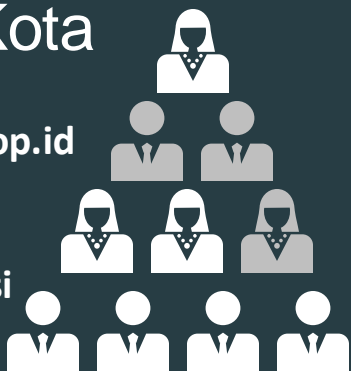
**1,235
PPKL**

Edukasi
Perkoperasian
kepada
Masyarakat

 www.ppklkemenkop.id

  **YouTube**

 **@penyuluhkoperasi**



Koperasi Berbasis:



Kawasan



Komunitas



Komoditas



**KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

TERIMA KASIH

**#AdaptasiDanTransformasiKoperasi
#MenujuKoperasiModern**



**BANGGA BUATAN
INDONESIA**



DISAMPAIKAN PADA:
WEBINAR OUTLOOK TRANSFORMASI
KOPERASI
DAN UMKM 2021



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

UMKM BERTAHAN PADA SAAT PANDEMI

Victoria br. Simanungkalit | Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Jakarta, 29 Desember 2020



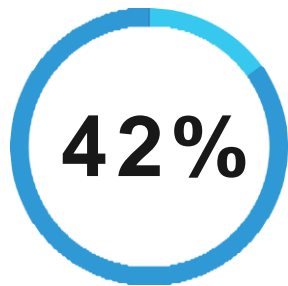


Dampak Pandemi COVID-19 Luar Biasa

Jika kita mengenal UMKM sebagai penopang perekonomian kala krisis tahun 1998, maka saat pandemi COVID-19 menerjang UMKM justru yang paling runtuh lebih dahulu.



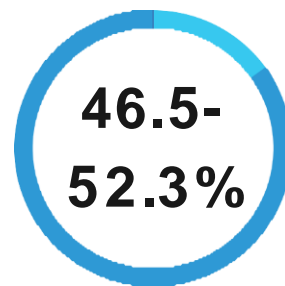
Berkurang
Pesanan/Permintaan



Memberhentikan
sebagian pekerja



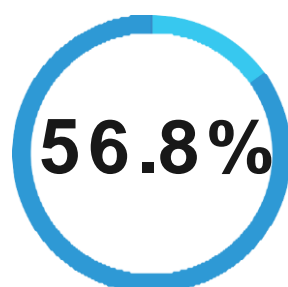
Mengubah jam
operasional



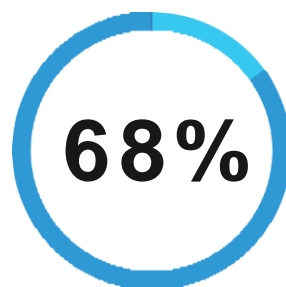
Mengurangi biaya
utilitas (listrik, gas, air,
komunikasi)



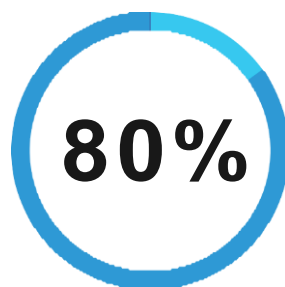
Titik terendah
pendapatan



Mengalami kondisi
sangat buruk



Menjual dengan
metode online



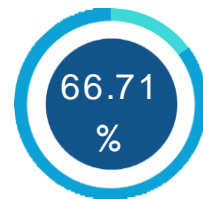
Penerapan Prokes

**6 Bulan -1
Tahun**

Prediksi Usaha
Kembali Normal

Kebutuhan UMKM Saat Pandemi dan Pemulihan

Kebutuhan UMKM saat **Pandemi**



Keuangan



Pendampingan
dan Konsultasi
Bisnis



Alat Produksi

Kebutuhan UMKM saat **Pemulihan**



Keuangan



Pendampingan
dan Konsultasi
Bisnis



Perizinan dan
Regulasi Bisnis



Apa yang sudah dilakukan Pemerintah?

123.46 T Dana PEN dan berbagai program lintas stakeholders, Pemerintah menempuh langkah gotong-royong untuk memastikan UMKM bertahan di tengah dampak COVID-19 yang kian menyesak.



6 Program PEN khusus UMKM mulai dari Restrukturisasi Usaha hingga Banpres Produktif



3.4 juta unit UMKM *onboarding*



303 T potensi PBJP dan 35 T potensi belanja BUMN



27 Juta masker UMKM senilai Rp. 150 M kolaborasi 9 Agregator dengan +200 UMK, Rp. 1.8M Masker Non-Medis Melalui Kimia Farma, Kolaborasi Karya Nusantara untuk Masker, APD, dll



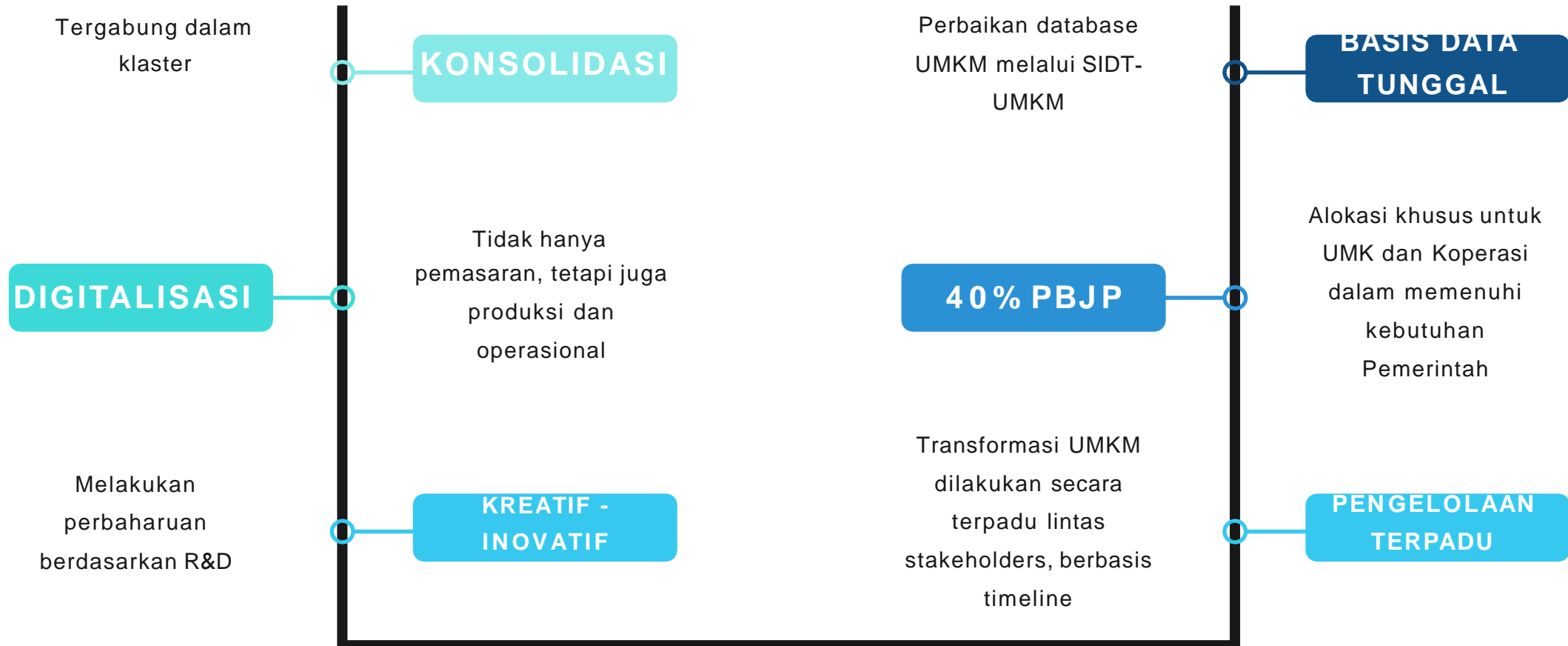
Pemenuhan 7 komoditas pangan masyarakat dari KUMKM melalui 9 Klaster Pangan BUMN



RPP KUMKM untuk Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM

Pengembangan UMKM Pasca COVID

COVID-19 telah berlangsung sejak Maret 2020 yang artinya telah hampir 9 bulan, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Penting bagi Pemerintah dan pelaku UMKM bersama-sama mengambil langkah pasti agar sesegera mungkin UMKM bisa pulih.



DISAMPAIKAN PADA:
WEBINAR OUTLOOK TRANSFORMASI
KOPERASI
DAN UMKM 2021



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

#KOPERASIKEREN #UMKMNAIKKELAS
#BELIPRODUKLOKALKUMKMTUMBUH



@KemenkopUKM





UU CIPTA KERJA **KADO** untuk Koperasi Keren dan UMKM Naik Kelas

Luhur Pradjarto

Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga

Dalam Rangka

OUTLOOK KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2021

Jakarta, 29 Desember 2020



HAMBATAN KOPERASI & UMKM SAAT INI

KOPERASI



UMKM

- Data masih tersebar di setiap k/L;
- Menggunakan Kriteria yang berbeda.
- Selama ini belum terbentuk kluster dan program masing-masing K/L dalam pembinaan maupun pemberian bantuan terhadap UMK belum tersinergi
- Pola kemitraan dinilai belum berkesinambungan, terlalu luas, dan tidak membantu pengembangan UMK.
- Banyaknya izin-izin yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK seperti SIUP, IUMK, NIB.
- Pembiayaan bagi UMK dilaksanakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan modal usaha UMK dengan skema subsidi bunga dan subsidi penjaminan dengan melibatkan Lembaga Keuangan.

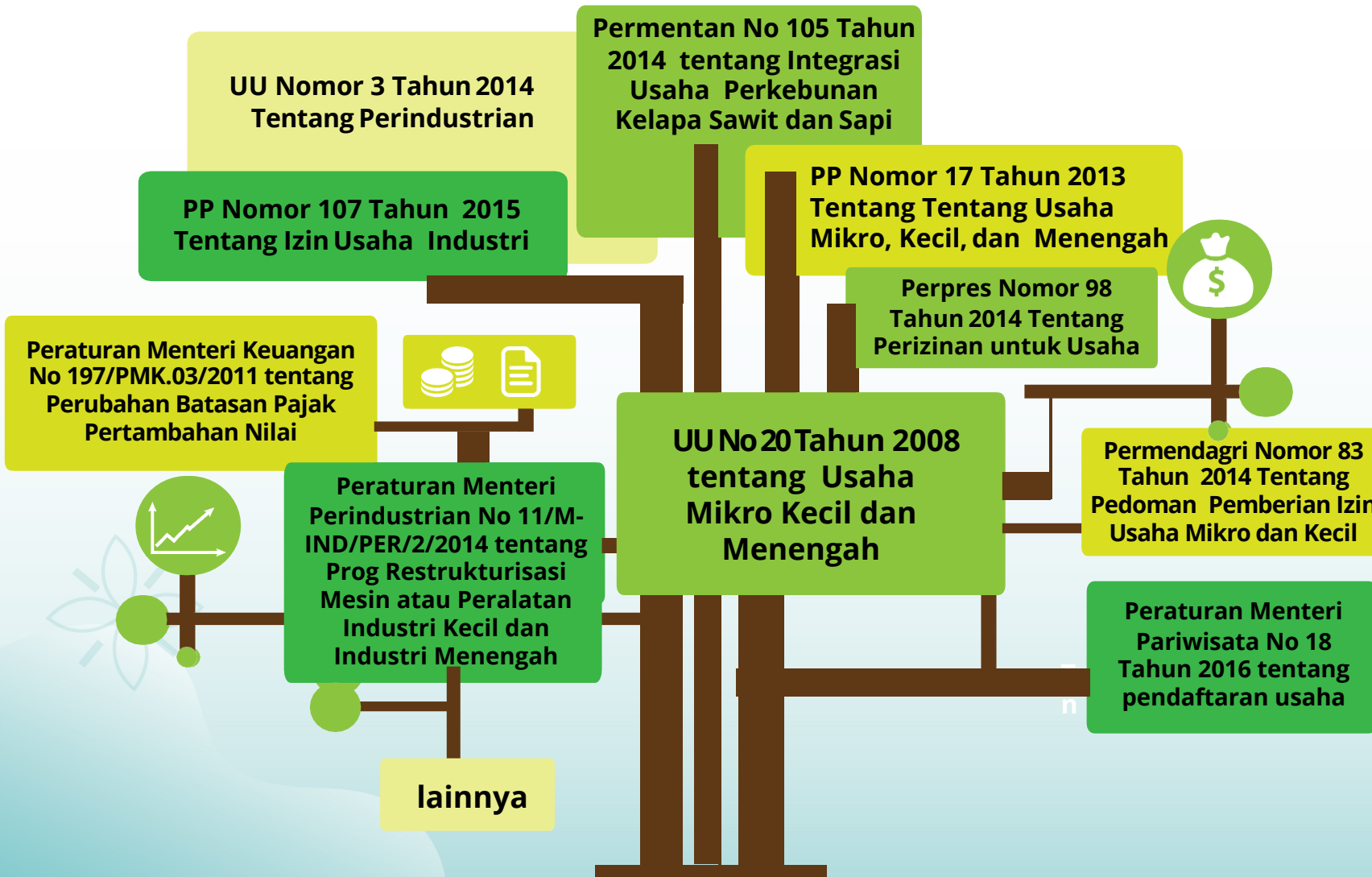




REGULASI YANG BERSINGGUNGAN



Persebaran Regulasi Koperasi dan UMKM

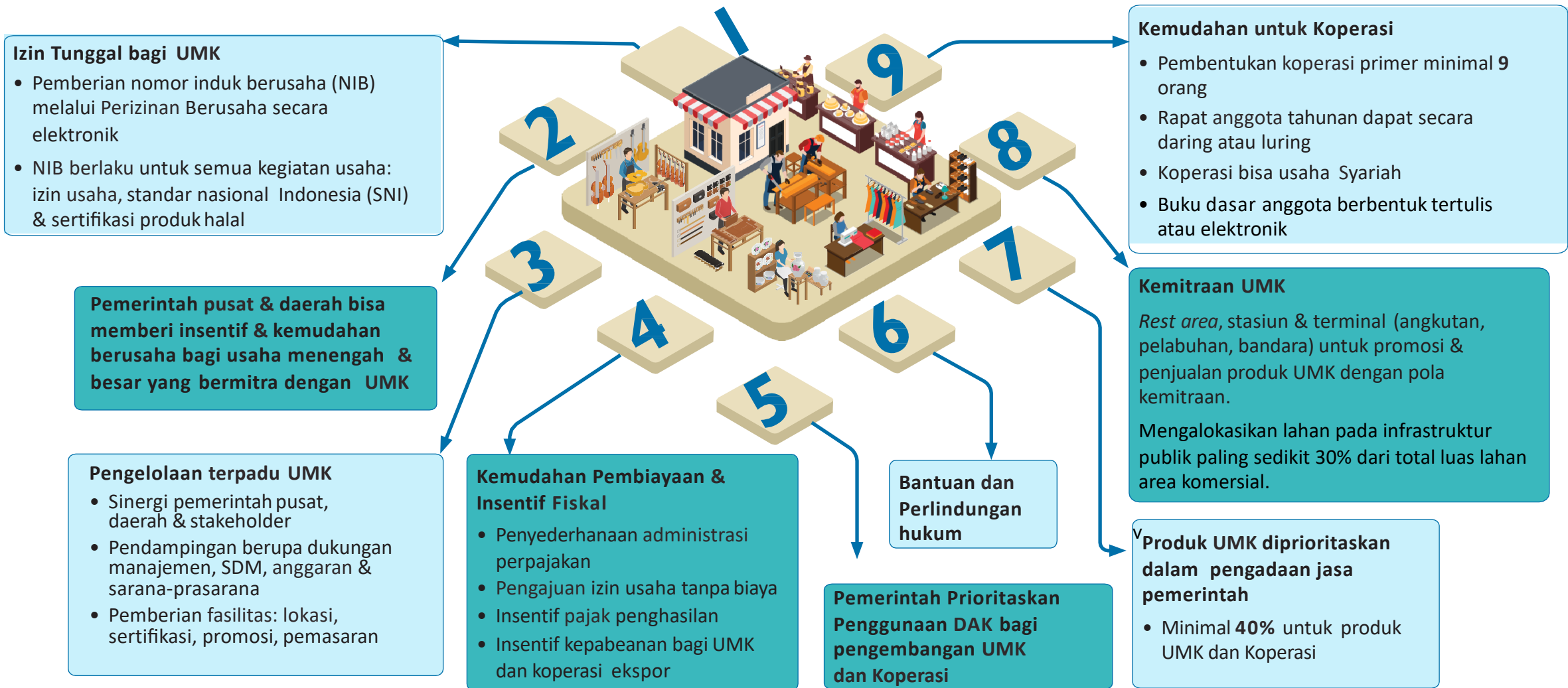


Rekap UU OMNIBUS LAW Klaster Kemudahan dan Perlindungan UMKM

1. UU No. 20/2008 tentang UMKM
2. UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
3. UU 18/2012 tentang Pangan
4. UU 3/2014 tentang Perindustrian
5. UU 7/2014 tentang Perdagangan
6. UU 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
7. UU No 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
8. UU 10/1998 tentang perubahan atas UU 7/1992 tentang Perbankan
9. UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
10. UU 1/2016 tentang Penjaminan
11. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU CIPTA KERJA KADO BAGI KOPERASI DAN UMK (UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

9 kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 85 s/d 104)





IDENTIFIKASI SUBSTANSI UMK-M DALAM BEBERAPA RPP DAN RPERPRES TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA





TERIMA KASIH

#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas
#SiapBersamaKUMKM

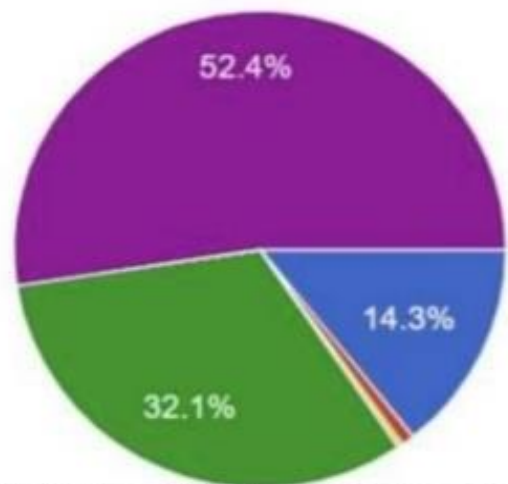


**KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

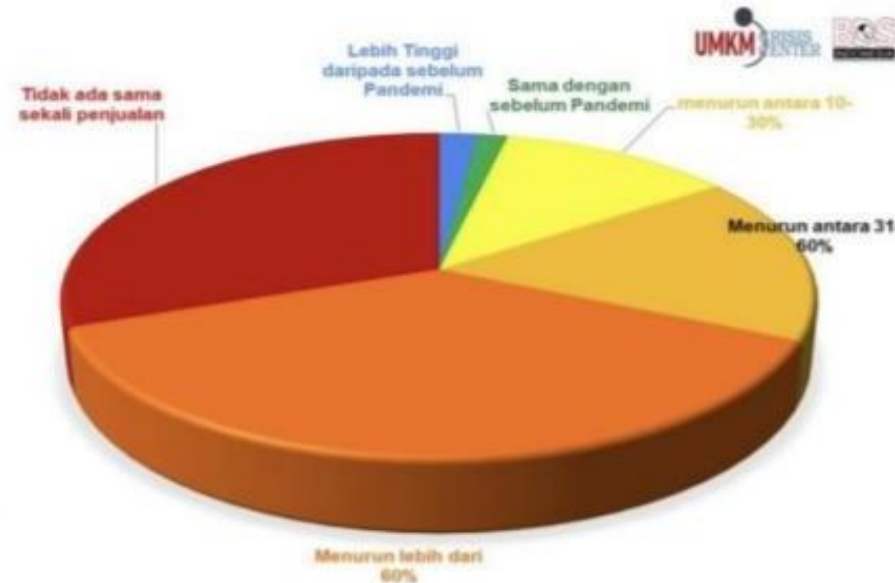
GOTONG ROYONG BANTU UMKM

**OLEH: HERUSTIATI
STAF AHLI MENTERI BIDANG PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING
JAKARTA, 29 DESEMBER 2020**

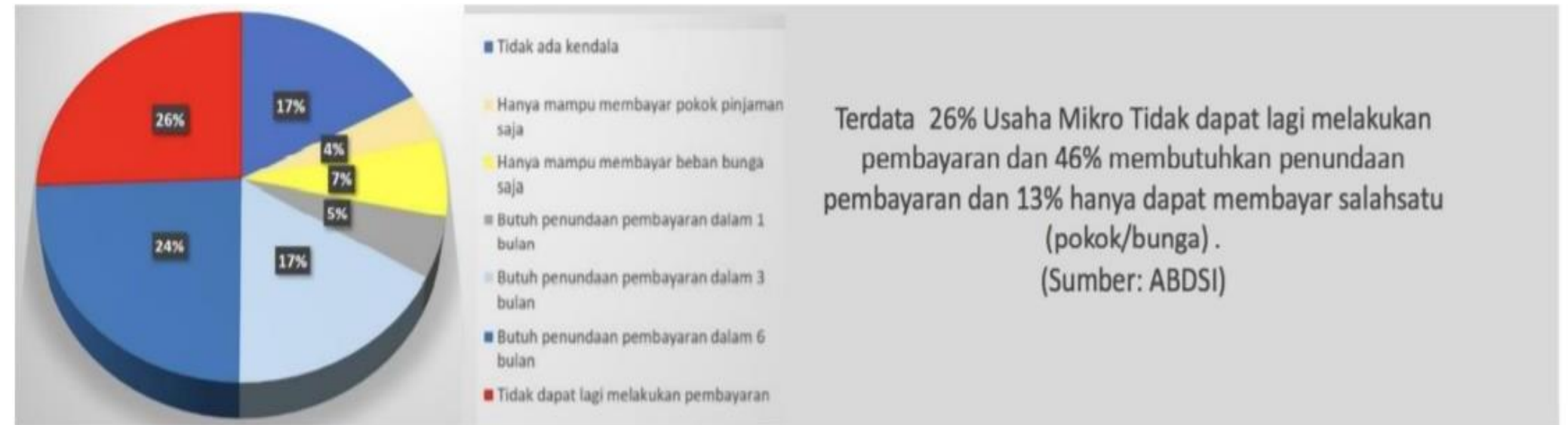
PENDATAAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM



Dari 3.434 Uaha Mikro terdampak covid yang terdata 52,4% Tidak memiliki Cadangan/Tabungan sama sekali. (Sumber: ABDSI)

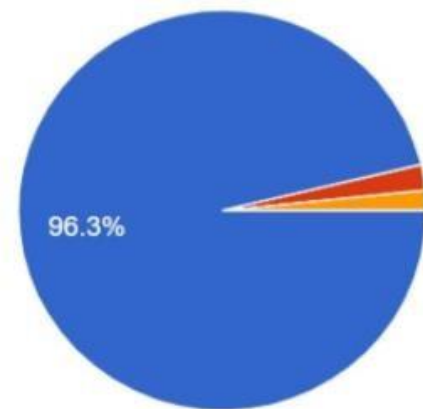


DAMPAK PANDEMI COVID TERHADAP PENJUALAN

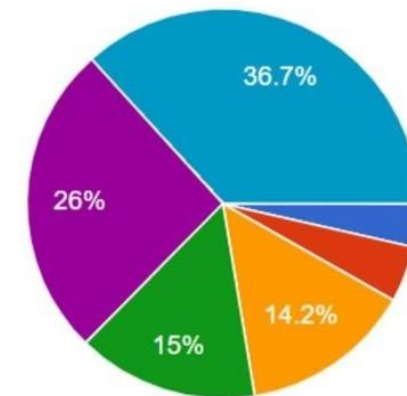


Terdata 26% Usaha Mikro Tidak dapat lagi melakukan pembayaran dan 46% membutuhkan penundaan pembayaran dan 13% hanya dapat membayar salahsatu (pokok/bunga). (Sumber: ABDSI)

Sumber: Asosiasi ABDSI



TERHADAP PERMINTAAN PASAR

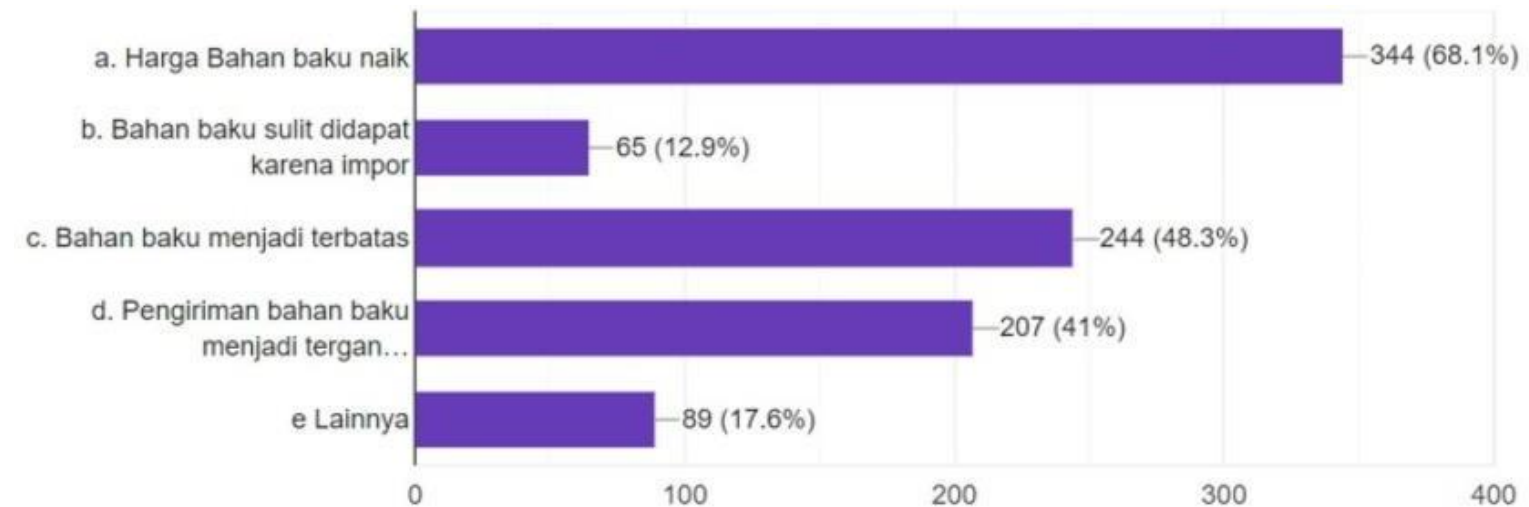


TERHADAP NILAI TRANSAKSI USAHA

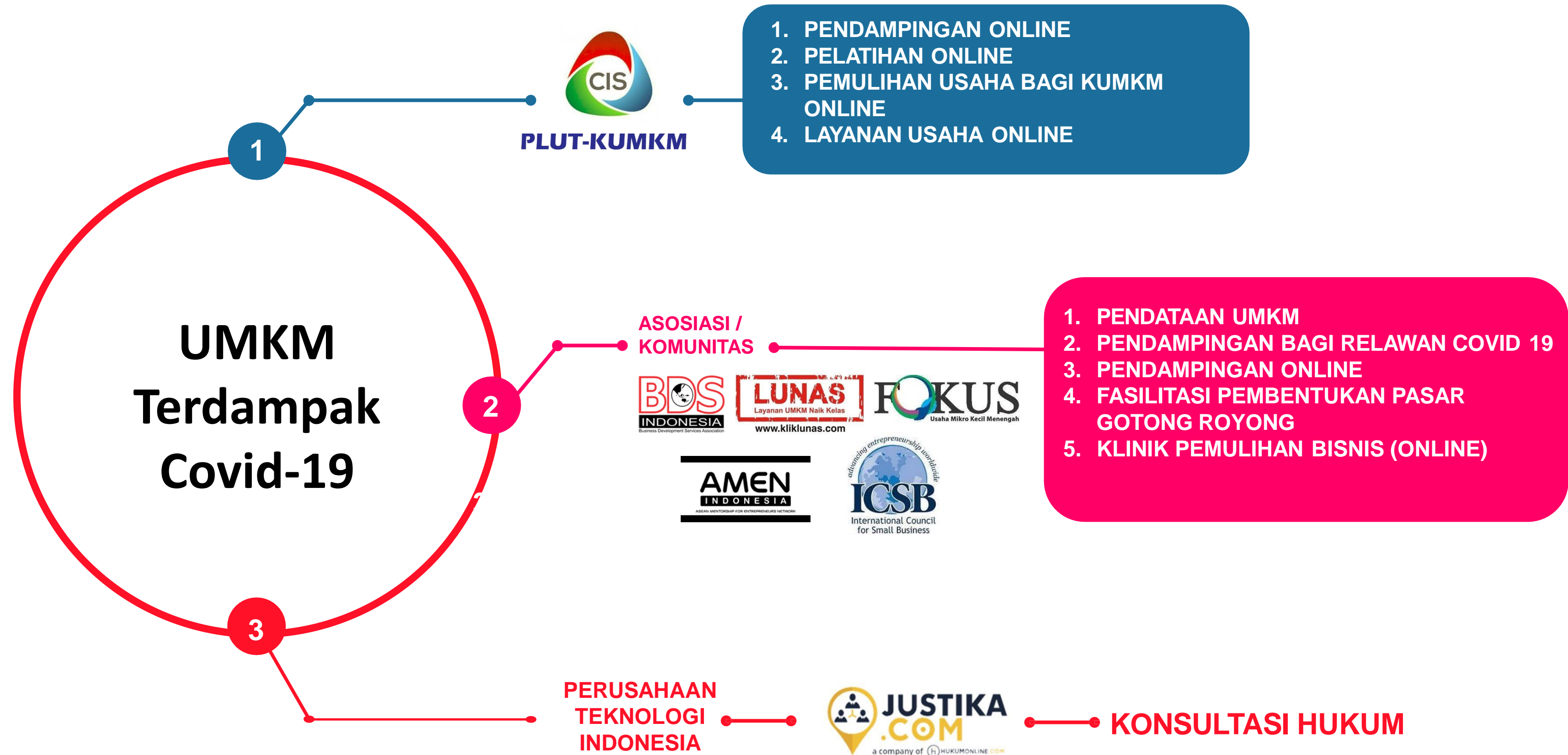


Sumber: abdsi.id/umkm-crisis-center

TERHADAP BAHAN BAKU



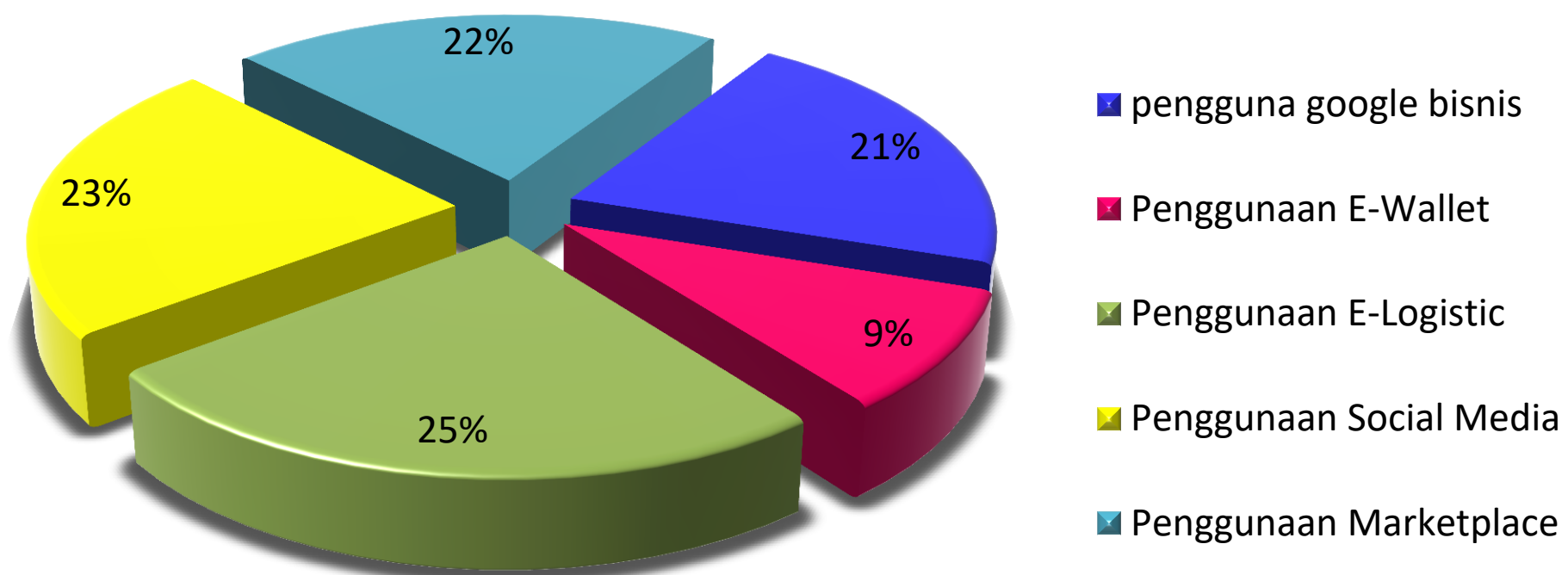
GOTONG ROYONG BANTU UMKM



HASIL KOLABORASI

PLUT – KUKM

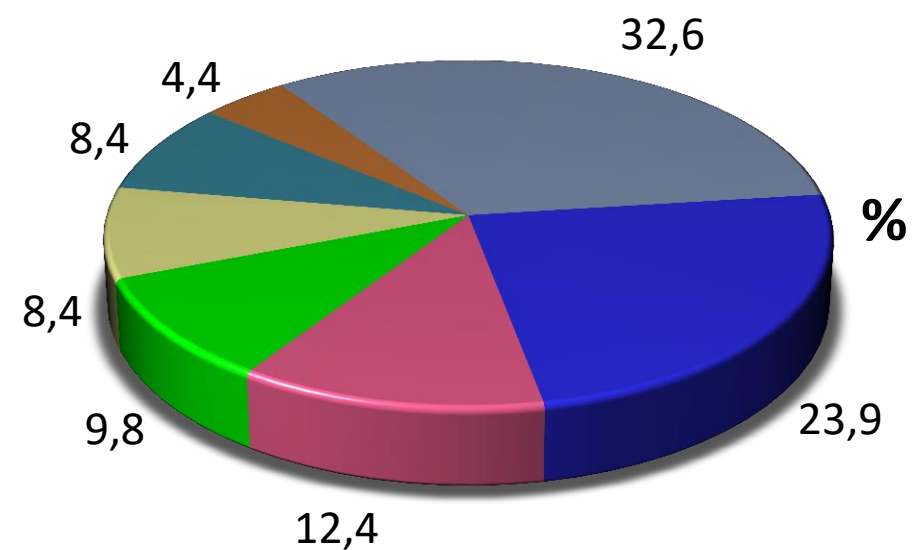
DIGITALISASI UMKM : 3.625 UMKM



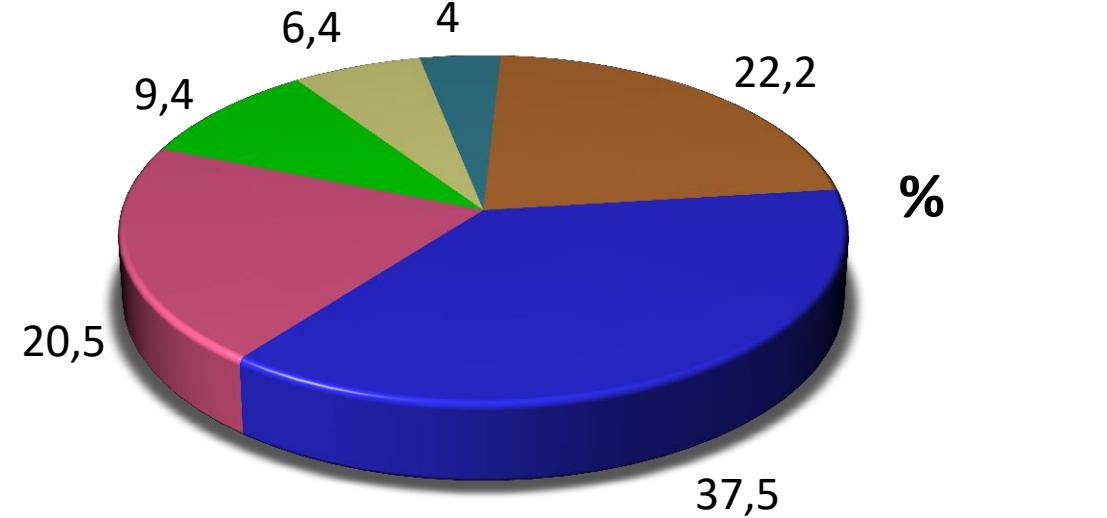
JUSTIKA

595 kasus dikonsultasikan UMKM

Pesebaran Domisili UKM



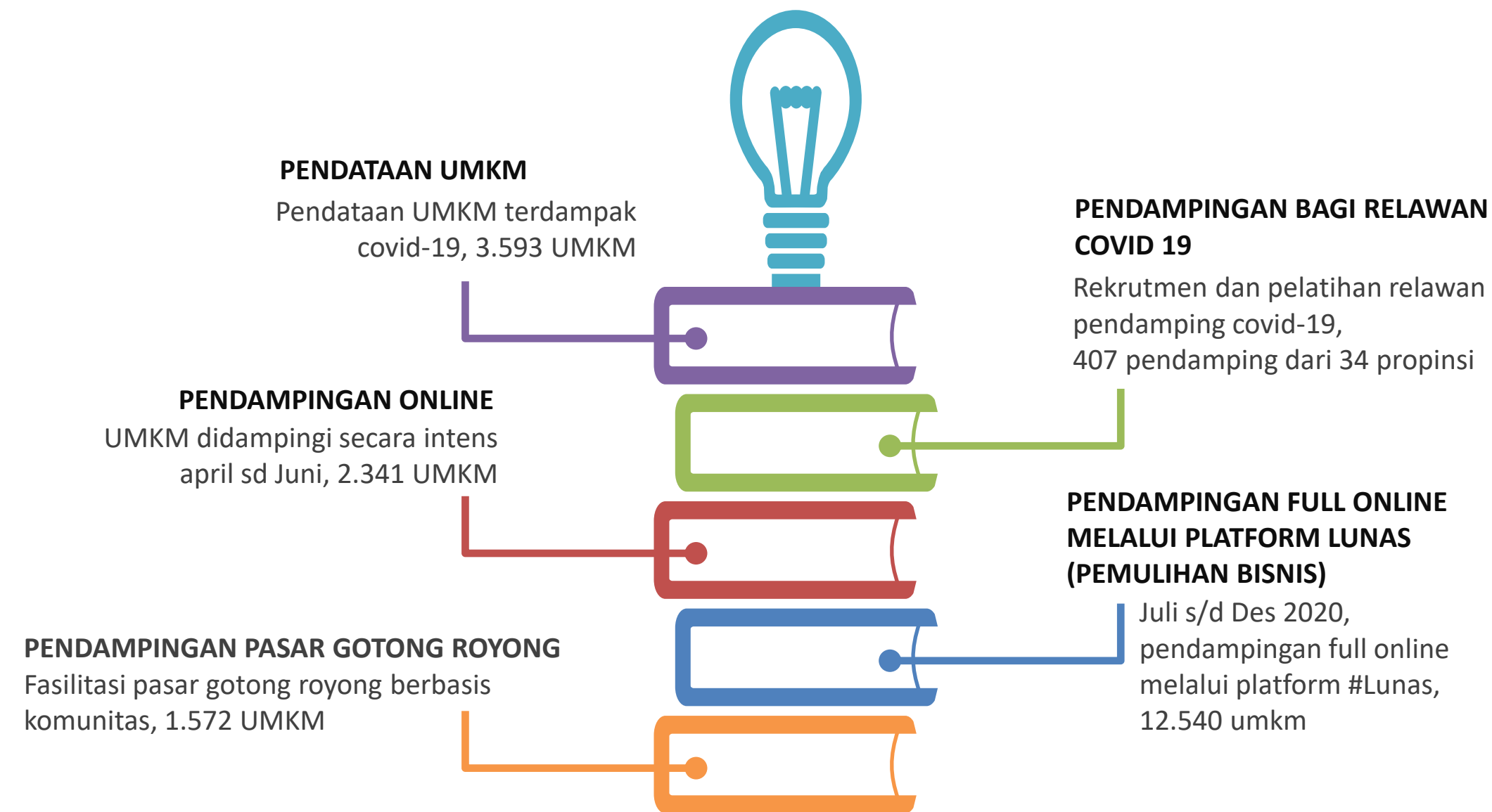
Masalah yang dihadapi



■ Jakarta
■ surabaya
■ Palembang
■ Medan
■ Bandung
■ Semarang
■ lainnya

■ Bisnis
■ Hutang Piutang
■ Ketenagakerjaan
■ Kekayaan Intelektual
■ Pidana
■ lainnya

LUNAS (LAYANAN UMKM NAIK KELAS) / FOCUS UMKM / AMEN INDONESIA / DIGMA / INTERNASIONAL COUNCIL FOR SMALL BUSINESS (ICSB) / ABDSI





TERIMA KASIH



@KemenkopUKM



kemenkopukm



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



Indikator Strategis KUMKM di Masa Depan

M. Riza Damanik, PhD.



ROADMAP PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM 2021 - 2024

- Ekspor UMKM 14%
- PDB UMKM 61.07%
- PDB Koperasi 5.09%

Baseline



2021

1. PDB UMKM 62,36%
2. PDB Koperasi 5,2%
3. Kontribusi Ekspor UMKM 15,12%
4. Pertumbuhan start up 900 unit
5. 100 Unit Koperasi Modern
6. 0,55% UKM naik kelas



2022

1. PDB UMKM 63,73%
2. PDB Koperasi 5,3 %
3. Kontribusi Ekspor UMKM 17,28%
4. Pertumbuhan start up 900 unit
5. 100 Unit Koperasi Modern
6. 1,35% UKM naik kelas



2023

1. PDB UMKM 65%
2. PDB Koperasi 5,5%
3. Kontribusi Ekspor UMKM 21,60%
4. Pertumbuhan start up 850 unit
5. 100 Unit Koperasi Modern
6. 4% UKM naik kelas



2024

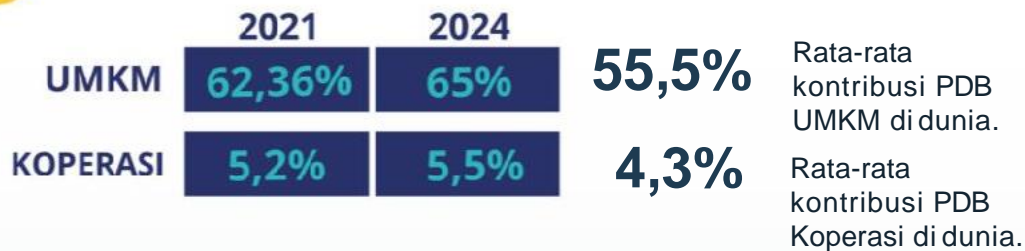
1. PDB UMKM 64,76%
2. PDB Koperasi 5,4%
3. Kontribusi Ekspor UMKM 19,44%
4. Pertumbuhan start up 850 unit
5. 100 Unit Koperasi Modern
6. 2,5% UKM naik kelas

Sumber : Lampiran Permenkop dan UKM No.5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024



OUTLOOK 2021: INDIKATOR STRATEGIS KUMKM

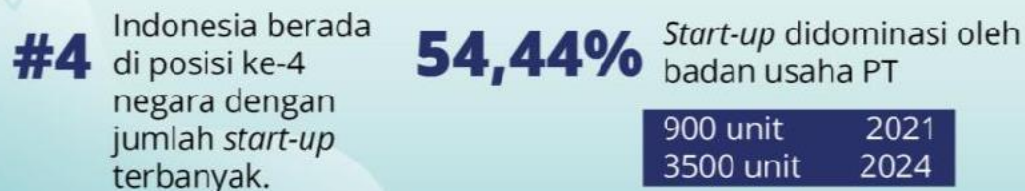
1 Kontribusi Terhadap PDB



2 Kontribusi Ekspor UMKM



3 Start-up Berbasis Inovasi dan Teknologi



4 Koperasi Modern Berbasis Digital

0,73% Dari jumlah koperasi aktif 123.048 unit, hanya 0,73% yang memiliki alamat *website*.

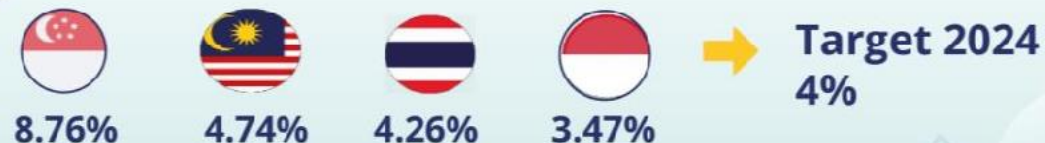


5 UMKM Naik Kelas




- Pengembangan kawasan dan Integrasi UKM masuk ke rantai pasok
- Digitalisasi Koperasi dan UMKM
- Inkubasi bisnis KUMKM
- Skema Pembiayaan sesuai model bisnis dan komoditi

6 Rasio Kewirausahaan



*2021: Transformasi Kelembagaan dengan perubahan SOTK sesuai Perpres 96 Tahun 2020

Sumber: 1. Kementerian Koperasi dan UKM dan berbagai data yang di olah. (2019)
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Badan Pusat Statistik
4. Kementerian Perdagangan



TERIMA KASIH

www.kemenkopukm.go.id



@KemenkopUKM



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



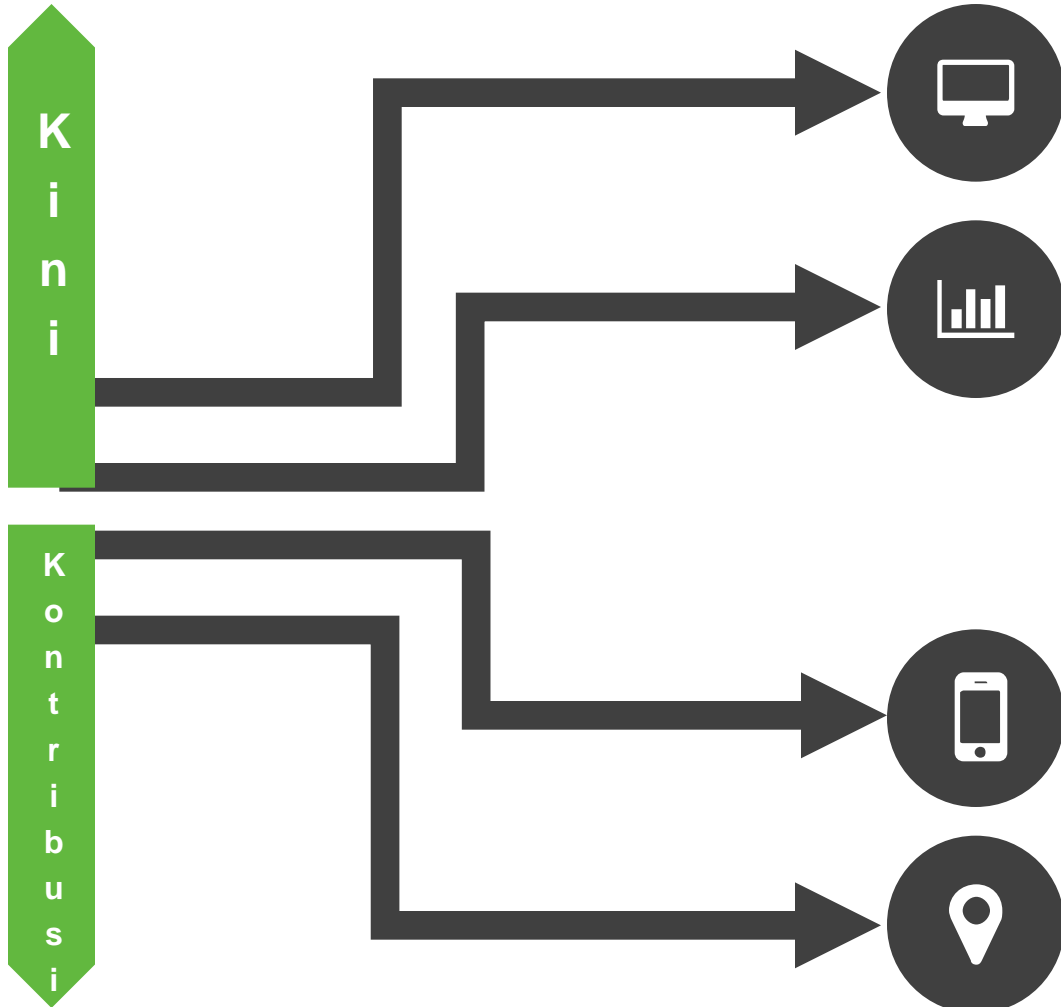
STRATEGI TRANSFORMASI KOPERASI MODERN

———— AHMAD ZABADI ————

Deputi Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM
Jakarta 29 Desember 2020



1. Koperasi Indonesia



Keragaan Koperasi

- Jumlah : 123.048 Unit
- Anggota : 22.463.738 Orang



Sebaran Koperasi

- Sektor riil : 106.499 Unit (86,55%)
- KSP/KSPPS : 16.549 Unit (13,45%)
 - KSP : 12.503 Unit (75,55%)
 - KSPPS : 4.046 Unit (24,45%)



PDB Koperasi : 5,1 %



Rasio terhadap Jumlah Penduduk
Dewasa : 8,42 %





2. Tantangan dan Outlook Transformasi 2021

Tantangan

Value Chain Partnership

Inclusive closed loop sebagai basis rantai kemitraan yang melibatkan :

- UMKM (sektor/komoditas tertentu)
- koperasi,
- perbankan, dan
- *off taker*



Outlook Transformasi 2021

Kontribusi Terhadap PDB

Mewujudkan Kontribusi Koperasi terhadap PDB secara tahunan-akhir tahun 2024 sebesar 5,10% - 5,50%

Koperasi Modern

Koperasi yang respek terhadap kemajuan untuk menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi anggotanya.



Jumlah Koperasi

Koperasi Baru, modern berbasis digital 400 Koperasi, yaitu :

- 2021 = 100 Kop
- 2022 = 100 Kop
- 2023 = 100 kop
- 2024 = 100 Kop



3. Transformasi Koperasi Modern





4. Strategi Modernisasi Koperasi



Multi Pihak

Koperasi berbasis *inclusive Closed Loop* dikembangkan sebagai Koperasi “*multi pihak*”



Fokus Koperasi di sektor Riil

Fokus koperasi sektor riil yang memiliki koefisien atau daya ungkit bagi tumbuh-berkembang. Fokus sektor atau komoditas:

- pangan
- pertanian, perikanan, dan
- pariwisata



Kemitraan

Bisnis hulu-hilir, mendorong hadirnya Kemitraan terbuka dengan para pihak :

- UMKM petani, pekebun, perajin,
- Koperasi,
- Pembiayaan/Bank,
- Off Taker.



Pembiayaan

- KUR,
- Dana Bergulir LPDB,
- Modal Penyertaan dan atau Obligasi,
- Sindikasi Pembiayaan (antar koperasi atau antara Koperasi dengan Lembaga Keuangan)



Amalgamasi

Vertikal, Amalgamasi atau merger sesama (antar) Koperasi sejenis, menjadi :

- Kop. bersama,
- Kop. baru

Horizontal, Amalgamasi atau merger unit usaha koperasi sejenis (Sub amalgamasi), melalui :

- pemisahan (split off)
- pemekaran (spin off)



Digitalisasi

- DigBis, Digitalisasi dalam Bisnis Proses Koperasi
- Meluaskan skala usaha dan efisiensi,
- Menghadirkan Kemudahan, kecepatan, ketepatan
- Go Public dan Go Global.



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih



KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

TRANSFUMi

TRANSFORMASI USAHA MIKRO INFORMAL KE FORMAL

EDDY SATRIYA
DEPUTI RESTRUKTURISASI USAHA | JAKARTA 29 DESEMBER 2020



TRANSFORMASI USAHA MIKRO INFORMAL KE FORMAL

“**SEKTOR INFORMAL** adalah cara melakukan pekerjaan apapun dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada daya lokal, milik usaha sendiri, beroperasi dalam skala kecil, padat karya dan dengan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian di luar sistem pendidikan formal, tidak terkena langsung regulasi dan pasar yang kompetitif” (ILO, 2006)

“Informality can be defined as “the collection of firms, workers and activities that operate outside the legal and regulatory framework” (Loayza, Serven, & Sugawara, 2009).

At the firm level, informality includes all those enterprises, but also auto entrepreneurs that produce legal goods and services but are not compliant with the country’s labour, fiscal and/or other administrative laws and regulations (Feige, 2016)”

BERTUJUAN UNTUK

Memberikan Kemudahan dan Perlindungan Usaha kepada Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya dengan Nyaman melalui Identifikasi dan Integrasi Data untuk mendapatkan Fasilitas dan kemudahan Usaha serta Perlindungan Hukum.

SEJALAN
DENGAN
SEMANGAT

UU CIPTA KERJA NOMOR
11 TAHUN 2020 DAN RPP
YANG SEDANG DISIAPKAN





OUTLOOK TRANSFORMASI USAHA MIKRO

TAHUN 2020



USAHA INFORMAL

Ciri-Ciri:

- Modal kecil
- Peralatan sederhana
- Laba Relatif kecil
- Tidak membayar pajak
- Tidak Berizin
- Tanpa Pembukuan
- Dikelola sedikit orang
- Pemasaran terbatas



77,68 JT orang pekerja

Sumber: BPS Per Agustus 2020

TERBIT NIB 512.246 NIB UMi 70%

DARI TOTAL 792.044 NIB

Sumber: Pusat Komando Operasi Pengawasan
Investasi BKPM Periode Jan- Sep 2020

TANTANGAN



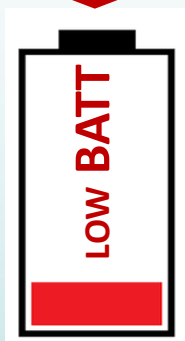
Terdampak Pandemi



Kesulitan Modal



Tidak Terkoneksi Dengan Ekosistem
Digital dan *Market Supply Chain*



**USAHA TERPURUK/TERANCAM GULUNG TIKAR/
TUTUP SEMENTARA**

TAHUN 2021



**LEGALITAS
USAHA (NIB)**

Target* Angka Perkiraan
2 s/d 3 Jt **NIB**

USAHA FORMAL

Ciri-Ciri:

- Memiliki kecukupan modal
- Memiliki izin usaha
- Laba cukup besar
- Mampu membayar pajak
- Memiliki alat produksi
- Memiliki laporan keuangan
- Pemasaran luas
- Memiliki tenaga kerja

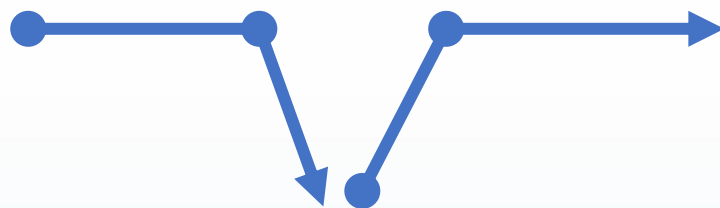


RANCANGAN TRANSFORMASI USAHA MIKRO TAHUN 2021

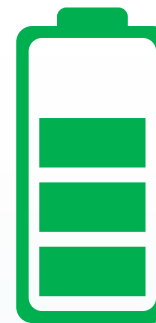


STIMULUS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

1. PEMBERIAN BANPRES
USAHA MIKRO (BPUM)
2. PROGRAM PEN LAINNYA



USAHA KEMBALI
NORMAL







**MENTORING
USAHA MIKRO PRODUKTIF
UNTUK NAIK KELAS**



**KONSOLIDASI
BRAND**



**PENGUATAN BADAN USAHA
MELALUI KOPERASI**



**AKSES PEMBIAYAN
LAINNYA**



**KEMITRAAN DAN
INVESTASI**



USAHA FORMAL



OUTLOOK 2021

UKM Tangguh Penyumbang Ekspor



Jakarta, 29 Desember 2020





LATAR BELAKANG

EKSPOR UMKM DI INDONESIA



5

Indonesia Ranguing Ekspor ke-5 di ASEAN



14,37%

Kontribusi UMKM terhadap Ekspor Nasional

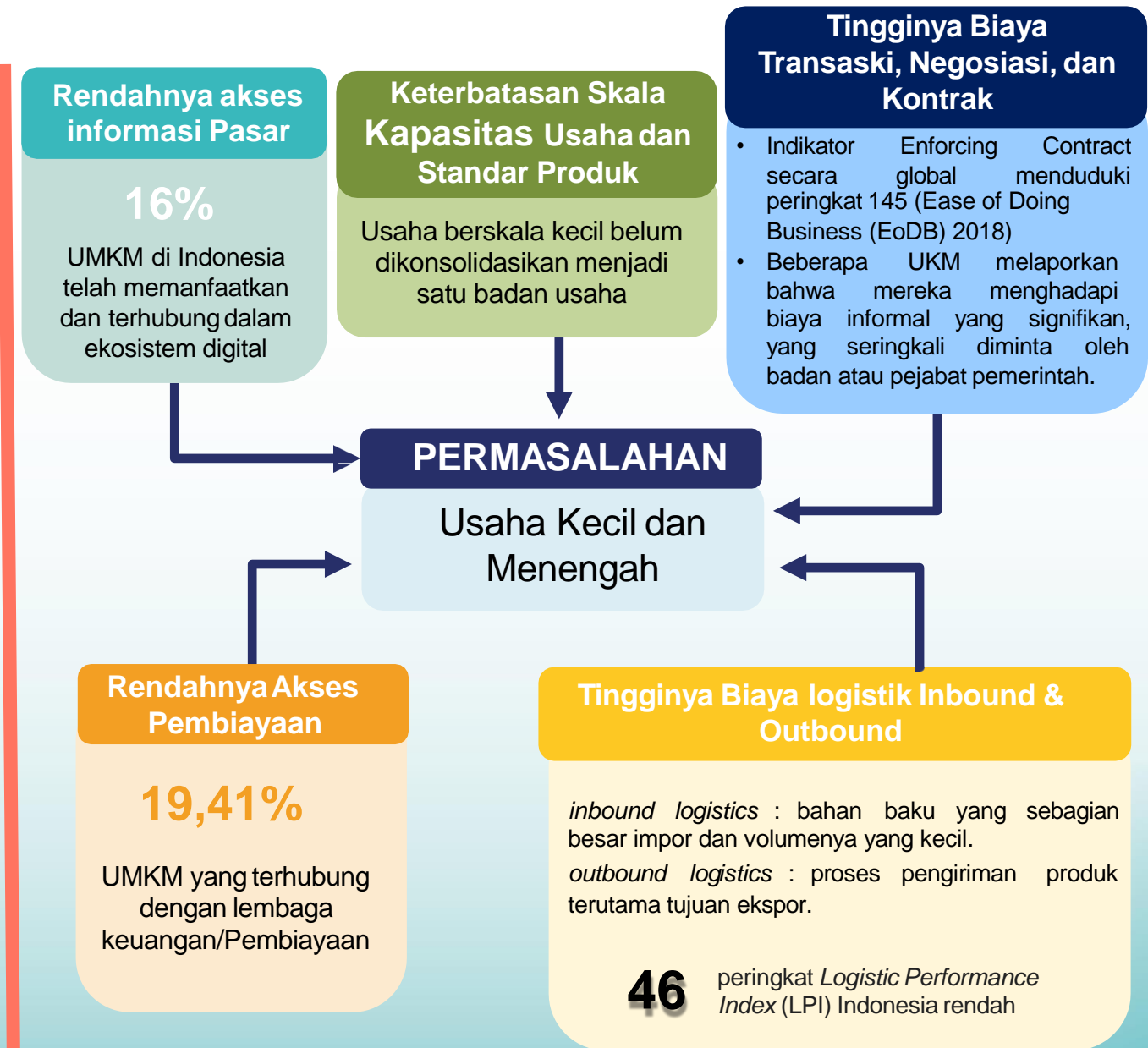


6,3%

Keterlibatan sektor UKM Indonesia dalam rantai nilai global sangat rendah

Target
Kontribusi
Ekspor
Indonesia

2021	➤	15,12%	2023	➤	19,44%
2022	➤	17,28%	2024	➤	21,60%





STRATEGI DAN SASARAN



STRATEGI UKM TANGGUH MELAKUKAN EKSPOR

- 1 *Market Driven/ Market Intelligence*
- 2 Kurasi *Champion* melibatkan asosiasi profesi, komunitas kreatif, *local brand*, dan media sosial
- 3 Digitalisasi UKM
- 4 Memperluas *Creative Space* Di Daerah
- 5 Keterbukaan Informasi Pasar dan *Channel* Distribusi
- 6 Dukungan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Internasional, Investasi atau IPO
- 7 Integrasi Sistem Logistik
- 8 *Factory Sharing (kemitraan)* berbasis *Value chain*

SASARAN PROGRAM & SEKTOR

SEKTOR (KLASTER DAN PRODUK UNGGULAN)

Tanaman Pangan

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

EKONOMI KREATIF

PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMKM

- UKM terhubung dalam Rantai Pasok
- Kemitraan Dengan Usaha Besar & Hilirisasi produk
- Korporatisasi UMKM/ Pertanian/ Peternakan (UMKM berbasis Klaster)
- Standardisasi dan Sertifikasi
- BUMN menjadi lokomotif UMKM
- Market Intelligence berbasis digital
- Integrasi Sistem Logistik

TARGET



EKSPOR



SUBSTITUSI IMPOR



RANTAI PASOK



UMKM NAIK KELAS

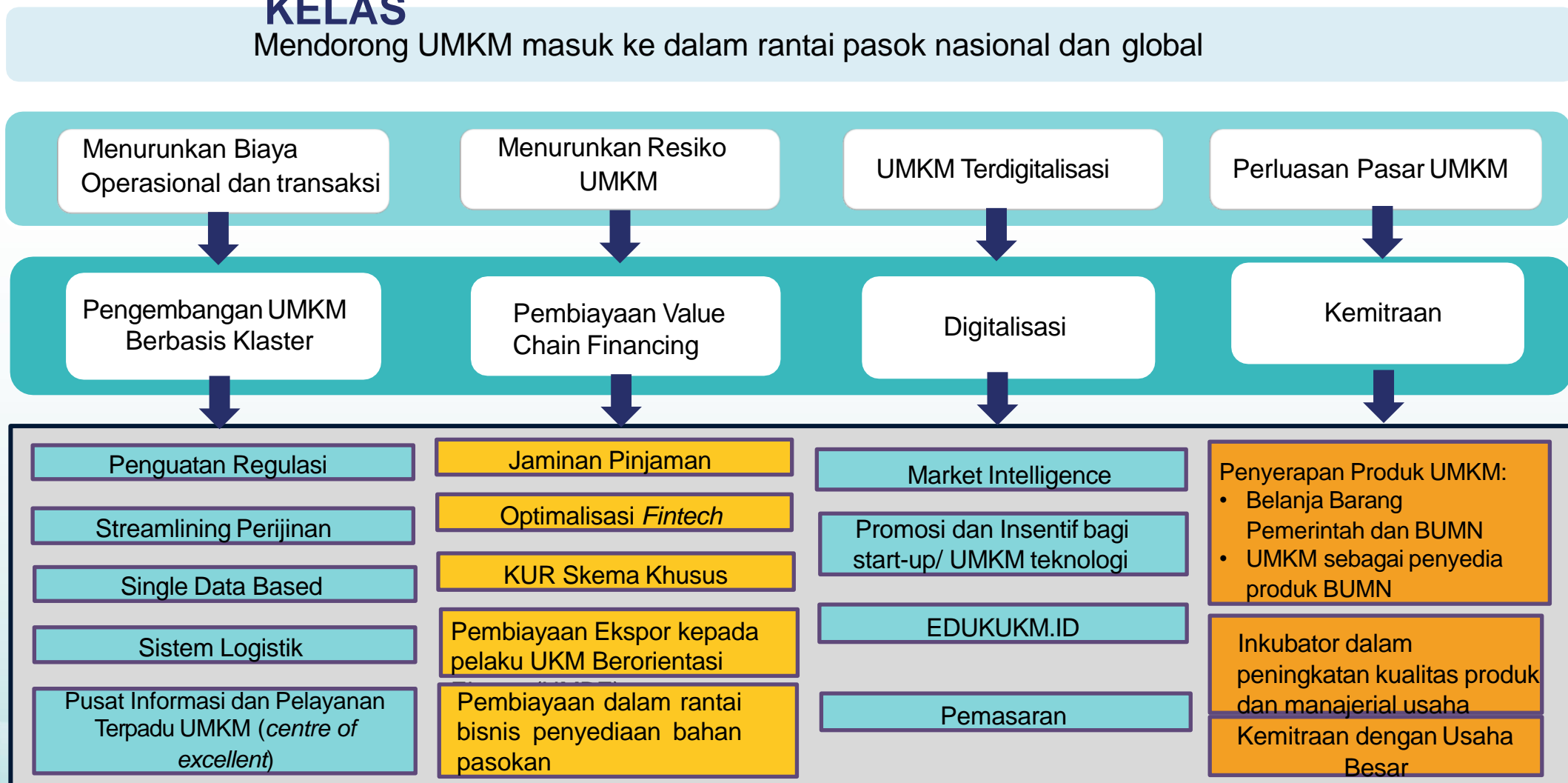
Mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok nasional dan global

TUJUAN

TARGET*

PILAR KEBIJAKAN

STRATEGIC ACTIONS



*) Target Kementerian Koperasi dan UKM dalam Renstra 2020-2024



TERIMA KASIH

#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas
#SiapBersamaKUMKM



**Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia**



Ir. Arif Rahman Hakim, MS

**COOPERATIVE AND SME
COVID-19
RESPONSE**

**KUKM OUTLOOK 2021
“WIRAUSAHA MUDA
PRODUKTIF DAN BERKUALITAS”**



strengths



weaknesses



opportunities



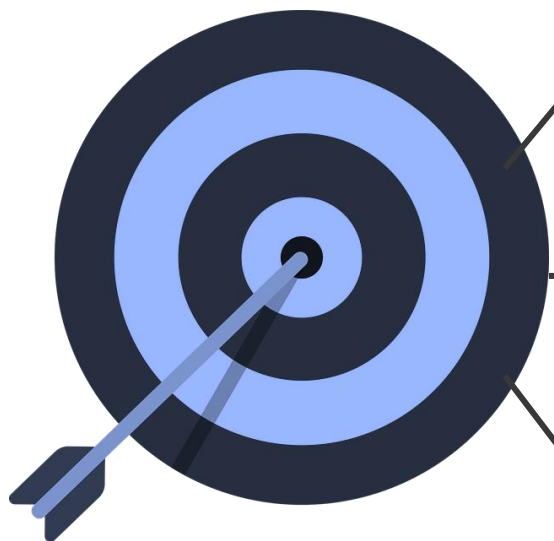
threats





TARGET RPJMN 2020-2024 YANG TERKAIT KEWIRAUSAHAAN

Target RPJMN 2020-2024 :
Rasio Kewirausahaan Nasional 3,9%



WIRAUSAHA MUDA PRODUKTIF DAN BERKUALITAS ADALAH WIRAUSAHA MUDA YANG MAMPU MENCIPTAKAN USAHA YANG INOVATIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MAMPU MENYERAP TENAGA KERJA

Perhitungan Rasio Kewirausahaan berdasarkan Jumlah Pelaku Usaha nonpertanian Yang Usahanya Menetap dibagi Total Jumlah Penduduk. Baseline Rasio Kewirausahaan Nasional tahun 2019 adalah 3,3% atau setara 8,2 juta Pelaku Usaha nonpertanian Yang Usahanya Menetap. Artinya dengan target 3,9% atau setara 9,7 juta Pelaku Usaha nonpertanian Yang Usahanya Menetap maka perlu penambahan 1,5 juta Pelaku Usaha nonpertanian Yang Usahanya Menetap dalam kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Penambahan 1,5 juta wirausaha harus dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif dan kaum muda cenderung memiliki potensi itu. Oleh Karenanya, wirausaha muda produktif dan berkualitas adalah wirausaha muda yang mampu menciptakan usaha yang inovatif dan berkelanjutan serta mampu menyerap tenaga kerja .

Dalam upaya penguatan dan pengembangan wirausaha muda produktif dan berkualitas maka potensi demografi yang dibutuhkan adalah, usia produktif 17 s.d 24 tahun, memiliki semangat wirausaha yang kuat serta daya nalar dan ilmu pengetahuan yang cukup serta terjaga oleh lingkungan yang kondusif.

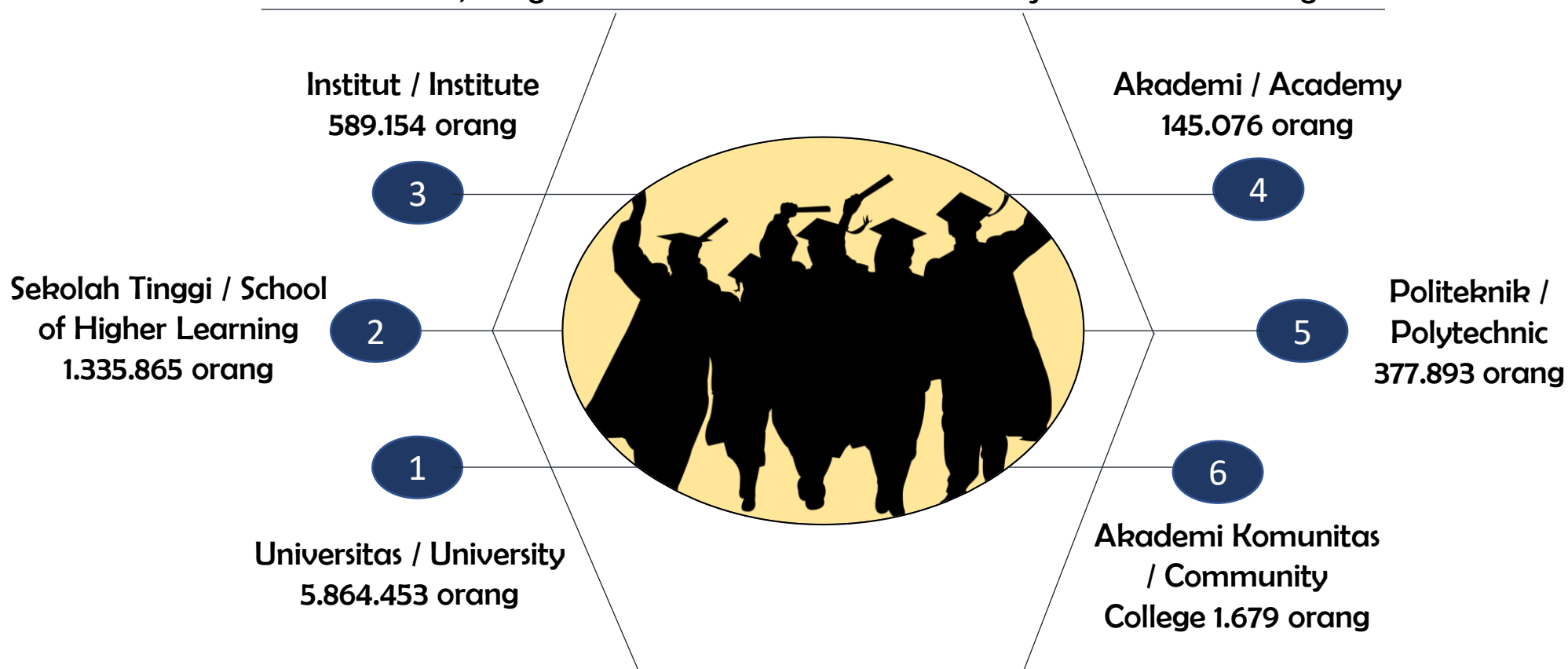


POTENSI DEMOGRAFI UNTUK Penguatan dan Pengembangan Wirausaha Muda Produktif dan Berkualitas



PERGURUAN TINGGI MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA MUDA BERKUALITAS YANG BERLIMPAH, SEHINGGA LAYAK MENJADI PRIORITAS UNTUK Penguatan dan Pengembangan Wirausaha Muda Produktif dan Berkualitas

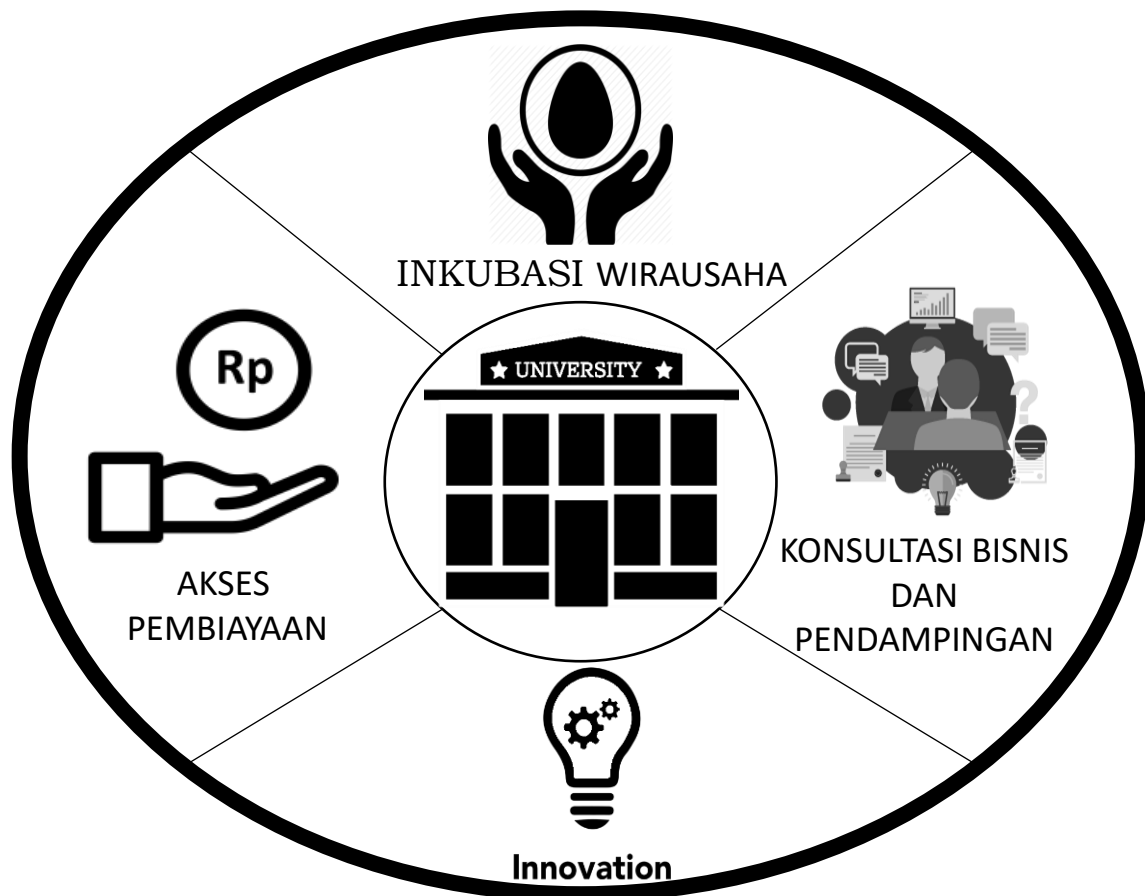
Pada tahun 2019 terdapat 4.621 lembaga Pendidikan Tinggi di Seluruh Indonesia, dengan total Mahasiswa terdaftar sebanyak 8.314.120 orang



Sumber : Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2019, (RISTEKDIKTI)

KERANGKA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA MUDA PRODUKTIF DAN BERKUALITAS MELALUI PERGURUAN TINGGI

PILOTING PROJECT EKOSISTEM BISNIS



1

Kementerian Koperasi dan UKM melalui sinergi dengan Dunia Usaha dan Industri akan menyediakan expert bisnis untuk layanan konsultasi bisnis dan pendampingan di lingkungan perguruan tinggi, sebagai upaya menjaring minat dan bakat wirausaha sekaligus sebagai sarana edukasi dan sosialisasi wirausaha dikalangan mahasiswa.

2

Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong penyelenggaraan inkubator wirausaha di lingkungan perguruan tinggi melalui bantuan operasional inkubasi wirausaha untuk memfasilitasi implementasi ide bisnis dan pengembangan rintisan usaha.

3

Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng HIMBARA dan Jaringan Angel Investor untuk menyediakan akses pembiayaan bagi mahasiswa calon wirausaha. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan mengalokasikan bantuan permodalan wirausaha pemula senilai Rp.20 juta bagi mahasiswa calon wirausaha.

4

Kementerian Koperasi dan UKM akan bersinergi dengan Kemenristek/BRIN untuk memfasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi usaha guna peningkatan nilai tambah dan penciptaan wirausaha berbasis peluang

Alberti, Sciascia, dan Poli (2004) dalam mengkaji "Entrepreneurship Education" menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam berwirausaha dipengaruhi oleh iklim usaha yang diciptakan oleh negara, dukungan dunia pendidikan, dunia usaha itu sendiri yang juga harus bergairah.

TERIMA KASIH

@KemenkopUKM

kemenkopukm



Transformasi Kebijakan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM



Agus Santoso, SH, LL.M

Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi & Pembiayaan





Transformasi & Kerjasama : KEMENTERIAN KOPERASI & UKM – LPDB KUMKM – LLP KUKM



Membuka peluang usaha untuk menjaga ekonomi nasional.



KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM

Badan
Pembuat Kebijakan



- Pengelolaan Dana Bergulir
 - Pendampingan
 - Inkubator Wirausaha



- Pelaksana layanan informasi pasar
- Sarana pemasaran, promosi, distribusi
 - Konsultasi pemasaran
- Pelatihan manajemen & teknis pemasaran
 - Inkubasi pemasaran



Transformasi Koperasi Indonesia

Regulasi 



Transformasi Digital dan Modernisasi



Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI No.9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

- Tujuh prinsip koperasi.
- *Compliance based*.
- *Prudential & risk based* penyelenggaraan transaksi keuangan termasuk AML/CFT.
- 4 klasifikasi usaha koperasi (KUK).



Undang-Undang No.11 Th 2020 ttg Cipta Kerja

- Pendirian koperasi primer (minimal 9 org),
- Digitalisasi koperasi,
- Koperasi dengan prinsip syariah.



- **Efisiensi manajemen:** pendaftaran *online*, digitalisasi RAT, kemitraan dengan perusahaan, jejaring dengan Koperasi, digitalisasi laporan keuangan.
- **Akses dan layanan:** kemudahan akses informasi dan layanan bagi anggota, transaksi non tunai, *marketplace*, anggota milenial.
- **Pengawasan:** kemudahan menganalisis kinerja koperasi, mitigasi risiko.

Kerjasama

Dan Sinergi antar Otoritas Pengawas lainnya



Bank Indonesia

sistem pembayaran dan transaksi non tunai a.l QRIS



Otoritas Jasa Keuangan

pengawasan koperasi dalam konglomerasi keuangan.



PPATK

anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT).



Transformasi UMKM Digital

Digitalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, meliputi komunikasi, informasi, transaksi (keuangan, pemasaran, pembayaran).

Tantangan Digitalisasi UMKM

- Target 10 juta UMKM
- UMKM di *marketplace* : harus bertahan & memiliki transaksi berkelanjutan.
- Kegagalan di *marketplace* : produk & pelaku tidak siap.

Sumber: Laporan KUKMHUB, 2020

Dukungan Kemenkop & UKM

- Perluasan Akses Pasar
- Efisiensi Proses Bisnis



Program Digitalisasi Kemenkop & UKM

Peningkatan kapasitas SDM

Perbaikan proses bisnis

Perluasan akses pasar

Penciptaan *local heroes*

UMKM di Era Pandemi

42%

UMKM menggunakan *social media/digital platform*

40%

UMKM merubah produksinya, menjadi alat kesehatan, makanan, *homecare*.

Sumber: *Covid-19 Impact on firms in Indonesia, survey The World Bank IBRD-IDA, 2020*

“The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow”.

– *Rupert Murdoch* –



TERIMA KASIH

#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas
#SiapBersamaKUMKM

OUTLOOK 2021

NEW LPDB

**NAFAS SEGAR
KOPERASI
INDONESIA**

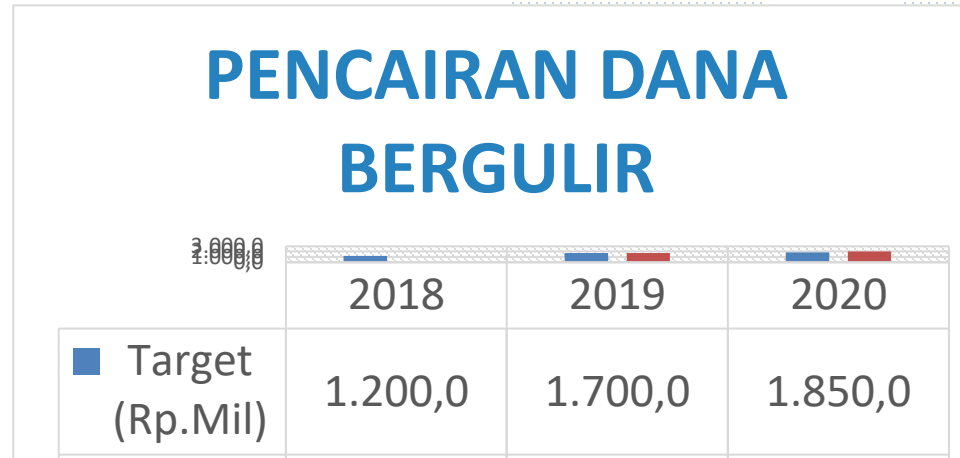


#WebinarAkhirTahunKemenKopUKM
Jakarta, 29 Desember 2020
Disampaikan oleh Supomo, Direktur Utama LPDB-KUMKM

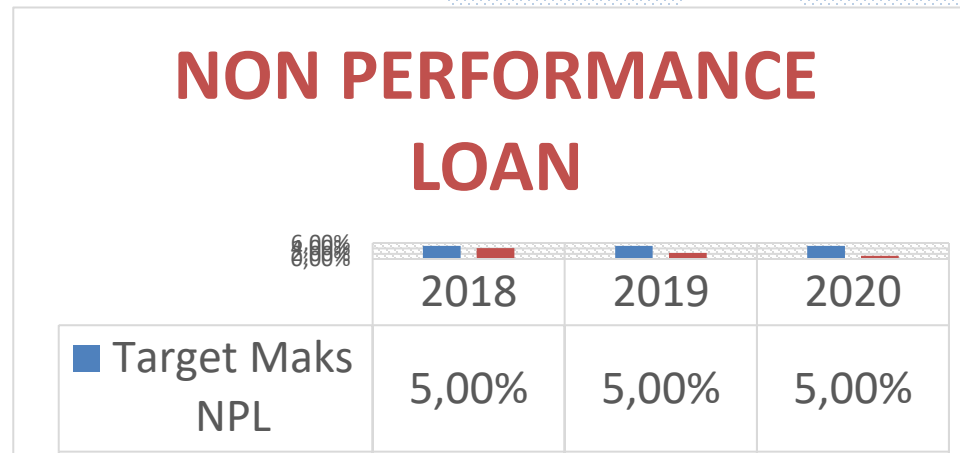
Kontribusi Penyaluran Dalam Angka



Pada tahun 2020, LPDB berhasil mencatatkan sejarah baru penyaluran tertinggi sejak tahun 2008 yakni sebesar Rp.2 Trilyun.



Growth : **16,03 %**



Terjaga : **< 5 %**

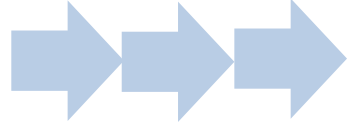
Catatan : Data penerima menggunakan penerima nominative dan definitive dari hasil Monev. Angka penyaluran menggunakan proyeksi s.d. 30 Desember 2020

Keberhasilan Capaian Kinerja

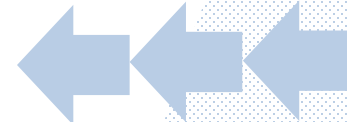


TRANSFORMASI

Sepanjang tahun 2020 LPDB telah melakukan **transformasi**, melalui beberapa strategi yang dilakukan.



130%



CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2020 LPDB berhasil mencapai angka kinerja penyaluran terhadap target yang diamanatkan.



**LPDB
KUMKM**

Mitra untuk Bangsa

NEWLPDB

9 November 2020 LPDB mendeklarasikan logo baru, dengan filosofi lingkaran, saling menguatkan, spirit solidaritas dan gotong-royong. Perpaduan roda gigi yang berputar, melambangkan perputaran ekonomi Koperasi dan UMKM.

PROSEDUR



On the Spot (OTS) dilakukan secara online oleh Petugas.

PROSES



Digitalisasi dokumen dan persetujuan selama proses.

DELEGASI



Pemangkasan prosedur penyaluran dana bergulir.

ONLINE



Penyatuan proses serta analisa bisnis dan risiko secara bersamaan.

DIGITAL



Pendelegasian pelaksanaan perikatan.

Strategi Bisnis Baru Tahun 2021



PENYALURAN

Fokus kepada Sektor riil dengan skema kemitraan, **untuk mempercepat program PEN.**

PENDAMPINGAN

Melakukan pendampingan **akses pembiayaan** dan peningkatan **kapasitas Koperasi.**



INKUBATOR

Bekerjasama dengan **10 Inkubator Wirausaha**, untuk menciptakan startup Koperasi dan UMKM.



CORE BUSINESS

Penguatan core business LPDB untuk melayani Koperasi dan UMKM.



LPDB NETWORK

Diharapkan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkualitas bagi Koperasi dan UMKM.

MITRA
(Koperasi)

KEMENTERIAN
LAINNYA

STARTUP
(KUKM)

BUMN

PEMDA

Terima Kasih

 @LPDBKUMKM  lpdb.kumkm  LPDB-KUMKM  www.lpdb.id  lpdb call center 1500856



LPDB-KUMKM 2020

2020
-
2021

A SMESCO
INITIATIVES

SMESCO SPARC

PROGRAM 2020-2021

Phase 1: Program berbasis data

Step 1: Digitalisasi data.

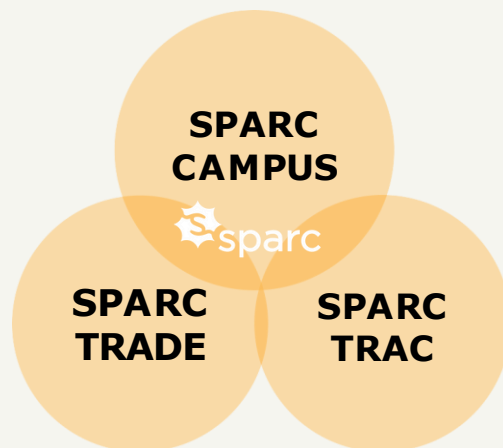
- Digitalisasi data mitra Smesco
- Merekam secara daring & memperbaharui data points secara berkala

Step 2: Pengembangan data.

- Integrasi data UKM binaan dengan mitra dan lembaga lainnya
- Mengembangkan opsi-opsi serta platform untuk mengumpulkan data mitra

Step 3: Analisa data.

- Menganalisa, memetakan, dan memvisualisasikan data untuk perancangan program UKM yang tepat guna & tepat sasaran



Input: Platforms, Media, Partners.



Data set
dari mitra/
lembaga
lain



Media
konservatif
& media
sosial



Pusat
konsultasi
KUKM/ call
center



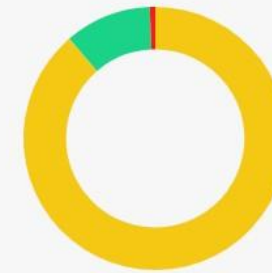
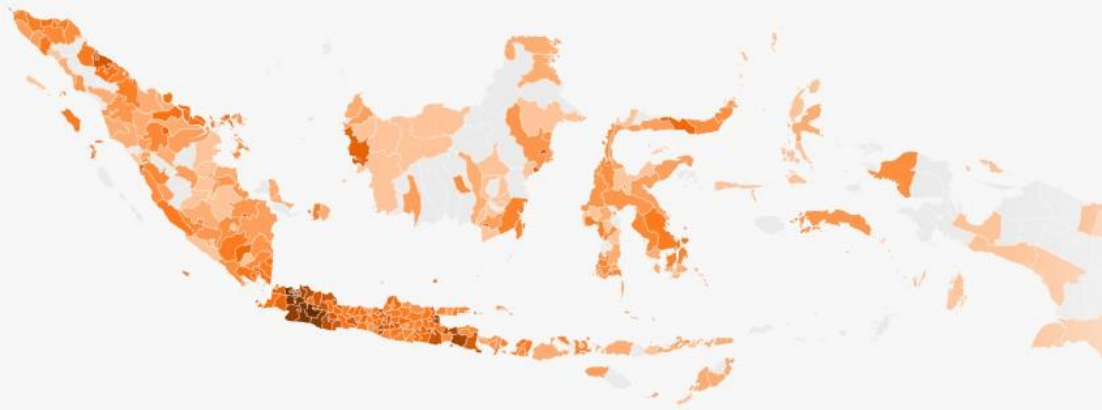
Pendaftaran
program / event

2020
-
2021

Output: Integrated dashboard

Data UKM Indonesia

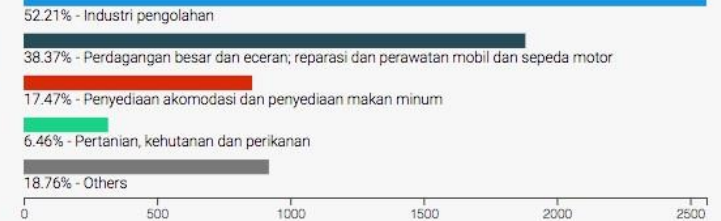
Total enterprises from all regions: 4,905



Total	4,905
Micro - 88.69%	4,350
Small - 10.64%	522
Medium - 0.67%	33

Categories

[KBLI list](#)



PENDATAAN,
DIGITALISASI,
PEMETAAN

Phase 2: Link & Match

Inkubasi Bisnis

Pengembangan kapasitas KUKM untuk dapat naik kelas, menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan agar dapat bersaing secara global.

- SPARC CAMPUS
- SMESCO LABO
- LOKA HEJO - KAMPUS KEBUN
- KAU

Promosi & pemasaran

Program promosi produk/jasa KUKM serta mempertemukan antara permintaan & pasokan. Menciptakan permintaan untuk industri serta komoditas prioritas nasional.

- SPARC TRADE
- KONVOI PRODUK NASIONAL
- DIGITAL MARKETING
- E-BROCHURE

Phase 3: Evaluasi & pengawasan

Pengawasan

Mengawasi progres KUKM binaan dari data-data & partisipasi dalam program untuk menilai performa dan pertumbuhan bisnisnya.

Pembaharuan

Memperbaharui data apabila terjadi penurunan, kenaikan, ataupun pivot dalam bisnis KUKM binaan.

Bantuan kelembagaan

Memberikan kemudahan bagi KUKM binaan yang membutuhkan asistensi untuk problem kelembagaan & legalitas.

Akses ke pembiayaan

Memberikan kemudahan bagi KUKM untuk dapat mengakses pembiayaan dari lembaga pembiayaan seperti LPDB, perbankan, atau lembaga lainnya